



PEMBUKAAN : Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Emex Verzoni membuka kotak suara yang masih disegel, disaksikan oleh ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Persadaan Harahap, kemarin.

ROHIDIN-ROSJONSYAH MENANG TELAK, AGUSRIN-IMRON GUGAT KE BAWASLU

Minta Pemungutan Suara Ulang

BENGKULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur tahun 2020, kemarin (17/12). Didapati bahwa Paslon nomor urut 2 Rohidin

Mersyah-Rosjonsyah menang telak dengan 418.080 suara. Lalu Helmi Hasan-Muslihan dengan 328.364 suara, dan Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi dengan 268.316 suara.

► Baca ROHIDIN...Hal 7

HASIL PLENO KPU PROVINSI BENGKULU ATAS PEROLEHAN SUARA PILGUB 2020

KPU	Helmi-Muslihan	Rohidin-Rosjonsyah	Agusrin-Imron Rosyadi
■ Kota Bengkulu	63.882	47.498	37.793
■ Benteng	22.571	22.553	13.418
■ Kepahiang	24.296	40.606	17.033
■ Rejang Lebong	42.816	63.343	34.109
■ Lebong	14.006	33.621	15.073
■ Bengkulu Utara	45.839	48.785	48.980
■ Mukomuko	34.727	38.972	20.528
■ Seluma	39.168	37.720	33.674
■ Bengkulu Selatan	17.063	50.706	29.762
■ Kaur	23.996	34.276	17.946
Total	328.364	418.080	268.316



Cab. Bandung

Aromania perfumery

Refill Parfume



POIN-POIN PP 70/2020

1. Pelaku persetubuhan terhadap anak dikenai kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.
2. Pelaku pencabulan terhadap anak hanya dikenai pemasangan alat deteksi elektronik.
3. Kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik berlaku maksimal dua tahun dan wajib disertai rehabilitasi tiga bulan setelah eksekusi.
4. Kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dilakukan begitu pelaku keluar dari lapas.
5. Eksekusi kebiri kimia diawali asesmen klinis dan psikiatris.
6. Bila hasil asesmen menyatakan tidak layak dikebiri, eksekusi ditunda enam bulan sambil diasesmen ulang.
7. Identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak diumumkan begitu pelaku keluar dari lapas.
8. Pengumuman identitas pelaku dilakukan selama satu bulan penuh.
9. Identitas pelaku diumumkan di papan pengumuman, website kejaksaan, media massa, media sosial, dan ruang-ruang publik lainnya.
10. Identitas pelaku yang diumumkan meliputi nama, foto terbaru, NIK, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili terakhir.

Predator Seksual Anak Dipenjara, Dikebiri, Lalu Dipermalukan

JAKARTA - Butuh waktu empat tahun bagi pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Yakni, lewat terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2020 baru-baru ini. PP itu mengatur pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

► Baca PREDATOR...Hal 7

LET'S GO TOGETHER

Agung TOYOTA

INDULGE IN THE THRILL

IN CHARGE OF BETTER FUTURE

COROLLA CROSS TWO SIDES OF THE FINEST

GASOLINE

HUBUNGI : **AGUNG TOYOTA**
BENGKULU - Jl. P. Natadirdja No.103 Telp. 0736 - 21127
HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23036
BOOKING SERVIS : 08537776873

Proyek Strategis Nasional Dipercepat Target Sebelum 2024, TUNTAS



RAKOR: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat mengikuti rakor percepatan pembangunan infrastruktur major project dan PSN, Kamis (17/12) di Kantor Gubernur Bengkulu. Bersama Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan SDA Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat. Serta Bupati BU dan Bupati RL.

BENGKULU - Pemprov Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Kemenko Maritim dan Investasi beserta stakeholder dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur major project dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kamis (17/12). Ditargetkan pembangunan ini tuntas pada tahun 2024.

"Sudah masuk dalam PSN dan penganggarnya sudah terploting dalam RPJM. Yang diharapkan selesai sebelum tahun 2024. Dari sisi infrastruktur dan anggarannya pasti, dan mulai dikerjakan tahun depan," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai mengikuti rakor bersama Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (SDA) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat di Ruang VIP Pola Kantor Gubernur Bengkulu.

► Baca TARGET...Hal 7

IST/RB/MC/PEMROV
PIMPIN RAPAT: Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri saat memimpin rakor evaluasi tahun 2020 dan kesiapan tahun anggaran 2020 khususnya terkait penanganan Covid-19, Kamis (17/12).



Siapkan Regulasi dan Anggaran

- Sisa Insentif Nakes Segera Dibagikan
- Bertambah 80 Kasus Positif

BENGKULU - Pemprov Bengkulu mulai mempersiapkan Bapelkes Provinsi Bengkulu untuk dijadikan Rumah Sakit (RS) Darurat. Mulai dari mempersiapkan regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), perlengkapan sarana yang dibutuhkan termasuk insentif terkait

keuangan. "Rumah sakit darurat ini diperuntukan yang memiliki gejala ringan dan sedang karena ruang isolasi di RSMY tidak mampu lagi menampung pasien yang terkonfirmasi. Nantinya di RSMY cukup kasus berat saja," kata Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri usai Rapat Koordinasi (rakor) evaluasi tahun 2020 dan kesiapan tahun anggaran 2020 khususnya terkait penanganan Covid-19, Kamis (17/12) di Kantor Gubernur Bengkulu.

► Baca SIAPKAN...Hal 7

Patuhi Protokol Kesehatan #DENGAN

SELALU GUNAKAN MASKER

Komprehensif Usut Kasus Jiwasraya

DPR: Bentuk Pansus, Libatkan Nasabah

JAKARTA – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menawarkan skema restrukturisasi untuk anggota forum korban badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Namun, para nasabah pemegang polis Jiwasraya Saving Plan tidak puas dengan tawaran itu. Mereka meminta win-win solution, bukan seperti yang tercantum dalam skema restrukturisasi tersebut.

Dalam pernyataan bersama yang Jawa Pos terima pada Rabu lalu (16/12), forum korban menyebut skema restrukturisasi itu tidak jelas. Padahal, Jiwasraya jelas bersalah dalam kasus gagal bayar tersebut. Selain Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN harus bertanggung jawab. Karena itu, forum korban meminta OJK melakukan mediasi dengan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mendukung reaksi tertulis Forum Korban BUMN Asuransi Jiwasraya tersebut. Kasus gagal bayar itu, salah satunya, diakibatkan kesalahan tata kelola perusahaan. Pengawasan oleh OJK, menurut Anis, juga lemah. Demikian juga dengan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara.

Anis mendesak DPR mengusut tuntas kasus tersebut. Langkah awalnya bisa dengan membentuk panitia khusus (pansus) karena ada indikasi bahwa fraud su-

dah berlangsung lama. "Namun, dalam perkembangannya, tidak ada pembentukan pansus untuk Jiwasraya," katanya kepada Jawa Pos.

Anis menegaskan, kasus Jiwasraya harus diusut tuntas. Jangan sampai pemerintah hanya mengambil jalan pintas. Misalnya, dengan menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) dan merugikan nasabah. Harus komprehensif. Artinya, melibatkan pemerintah secara aktif dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. "Jangan sampai kerugian negara karena pengelolaan yang buruk dan indikasi fraud ini dibebankan kepada rakyat melalui APBN," ungkapnya.

Menurut Anis, kasus itu menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Khususnya, nasabah-nasabah asuransi tanah air. Banyaknya korban mencerminkan minimnya edukasi tentang asuransi terhadap masyarakat.

Di sisi lain, nasabah juga sering enggan bertanya tentang skema asuransi yang dia ikuti. "Apalagi, perusahaan asuransi ini adalah milik negara yang seharusnya paling terpercaya," imbuhnya.

Terkait produk saving plan, seharusnya OJK mempertimbangkan kondisi keuangan Jiwasraya yang tidak sehat. Sayangnya, regulator tetap memberikan izin.

Secara terpisah, staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebutkan bahwa pemerintah memberikan PMN sebesar Rp

22 triliun untuk menyelamatkan Jiwasraya. Dana tersebut akan diberikan dua tahap. Sebesar Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun di 2022.

Arya menjelaskan, dana PMN akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUJ). Untuk kemudian, mendirikan anak usaha IFG Life. Sunkitan modal tersebut memberikan kepastian kepada pemegang polis. Khususnya bagi pemegang polis sejak 2018 yang sudah tidak mendapat haknya.

"Sunkitan modal itu bukan bail out. Ini bail in. Yaitu, melakukan penanggulangan masalah, memasukkan modal, dan juga menutupi kerugian akibat di BUMN," paparnya.

Lebih detail, Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat, ada 656 kontrak polis korporasi yang bersedia direstrukturisasi hingga 15 Desember. Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Jangka Menengah Indra Widjaja mengatakan, angka tersebut sudah lebih dari 31 persen pemegang polis korporasi yang totalnya 2.094 kontrak.

Menurut dia, para pemegang polis menyikapi kondisi keuangan Jiwasraya saat ini dengan baik. "Dengan capaian ini, kami optimis program restrukturisasi polis Jiwasraya dapat diikuti seluruh pemegang polis, baik ritel, bancassurance, maupun korporasi," ungkap Indra dalam keterangan tertulis kemarin (17/12). (jgg)

Sambungan dari halaman 1

Target Sebelum 2024, Tuntas

Sambungan dari halaman 1

Sambung Rohidin, sejak setahun lalu, kita sudah melakukan rapat khusus dengan Bappenas, Menko Perekonomian dan Menko Maritim Investasi. "Waktu itu menyepakati program strategis yang bersifat merger, yaitu di Pulau Enggano," kata

Lanjutan beberapa proyek strategis nasional, meliputi pemangangan jalan poros utama dari bandara sampai ke Pelabuhan Kahyapu, membangun lingkaran luar Pulau Enggano, Pembangunan pelabuhan Kahyapu dan Malakoni, pengembangan bandara Enggano, penambahan rute penerbangan dari Jakarta ke Enggano atau Bandara Fatmawati.

Rohidin juga meminta agar dibuat regulasi yang melibatkan masyarakat adat untuk pemangangan di Pulau Enggano. Supaya masyarakat lokal tidak menjadi tamu di wilayahnya sendiri. "Kita harus selalu melibatkan masyarakat adat di sana. Terutama mengenai perizinan pemanfaatan kawasan hutan di Enggano," tegas Gubernur.

Menurut Rohidin, pembangunan infrastruktur ini sebagai urat nadi untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Bengkulu.

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Bengkulu merupakan hasil kerja sama yang baik antar semua pihak yang didukung oleh masyarakat. Maka, cita-cita bersama untuk menjadikan Bengkulu Maju akan membuahkan hasil yang maksimal. Seperti, pembangunan jalan Trans Pulau Enggano yang masuk dalam kawasan administratif Kabupaten Bengkulu Utara. Pulau yang memiliki luas 400,6 Km² ini dihuni oleh penduduk sebanyak 3.800 jiwa.

"Enggano memiliki komoditas pertanian yang cukup unggul, begitu juga sektor perikanan namun aksesnya masih terbatas. Inilah yang terus kita dorong, mulai dari pengembangan pelabuhan, jalan, bandara sebagai akses

utama distribusi. Enggano juga dikenal sebagai surga bahari tentu minat wisatawan juga tinggi," papar Rohidin dalam rakor.

Saat ini akses transportasi di Enggano berupa jalan lingkaran dengan aspal penetrasi sepanjang 22,7 Km, didukung dengan keberadaan Bandara Enggano sebagai bandara evakuasi, membuka daerah terisolir, membuka pertumbuhan ekonomi, alih moda dan pariwisata. Bandara ini memiliki runway sepanjang 1.600 m x 30 m, area parkir pesawat 100 m x 80 m, taxi way 106 m x 23 m.

Bandara yang berada di Kampung Pikek, Desa Banjarsari ini membutuhkan peningkatan sarana prasarana penunjang, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, maupun penyediaan jaringan telekomunikasi. Sementara, untuk pengembangan pelabuhan sebagai jalur distribusi di Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu.

Selain percepatan pembangunan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, percepatan pembangunan infrastruktur major project dan PSN lainnya, yaitu update progress Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Bengkulu Tengah, serta pembangunan jalan tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu.

Bakal Dilalui Jalan Tol

Percepatan pembangunan tentu saja masih difokuskan pada keberadaan tol yang akan terkoneksi dengan kawasan Sumatra bagian tengah dan Pelabuhan Pulau Baai. Ini akan memberikan pengaruh positif pada berbagai sektor. Kelancaran transportasi akan memudahkan akses logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menunjang geliat pariwisata di Provinsi Bengkulu.

Bila sebelumnya akses tol dirancang melintasi dari Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang-Lubuk Linggau, saat ini telah dilakukan revisi agar tol juga melintasi wilayah Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga dapat diakses warga setempat. Gubernur Rohidin pun mendukung usulan yang disampaikan Bupati Rejang Lebong Ahmad

Hijazi yang juga hadir saat rakor kemarin.

"Mengingat Rejang Lebong sebagai penghasil komoditi pangan yang mayoritas berupa sayuran, sehingga bila ada tol di sana, distribusi hasil bumi tentu akan semakin lancar dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Ini juga yang harus menjadi pembahasan lebih lanjut," beber Rohidin.

Sementara itu, Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan SDA Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat, menerangkan, major project kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memenuhi pelayanan dasar serta mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antar wilayah.

Sedangkan major project lintas sektoral diharapkan mampu menjadi langkah kongkrit dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan. Major project diharapkan juga dapat menjadi acuan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan major project serta dukungan yang dibutuhkan dari berbagai instansi yang terlibat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha masyarakat," jelas Rahman.

Rahman menambahkan, major project sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang dapat bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dan/atau prioritas nasional. Dalam major project di pulau-pulau kecil terluar, pulau Enggano menjadi salah satu lokasi pengerjaan jalan trans 2020-2024 yang pelaksanaannya dari Kementerian PUPR dan pemda.

"Saya baru pulang dari Pulau Enggano, bila dibandingkan dengan kedatangan saya beberapa tahun lalu, memang kondisinya sekarang jauh lebih baik," pungkask Rahman. (key)

Siapkan Regulasi dan Anggaran

Sambungan dari halaman 1

Rapat yang digelar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, pihak RSMY Bengkulu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, terangnya, membahas persiapan RS darurat. RS darurat ini tidak sembarang terbentuk, ada persyaratan-persyarat yang harus dilalui. Mulai dari kesiapan regulasi SDM, hingga perlengkapan sarana dan prasarana.

"Anggaran persiapan untuk RS darurat, khusus Bapelkes disiapkan dari APBD provinsi. Sedangkan untuk 3 RS darurat lagi yang Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan itu dari kabupaten masing-masing yang menyiapkannya," jelas Hamka.

Hamka menerangkan Bapelkes sebelumnya digunakan untuk mengkarantina petugas kesehatan yang ikut menangani Covid-19. Namun ketika nanti Bapelkes digunakan untuk pasien Covid-19 maka lokasi karantina petugas medis rencananya akan dialihkan ke Asrama Haji. Saat ini dalam proses pengajuan peminjaman.

"Kalau LPMP sudah jalan, dan untuk Asrama Haji hari ini kita tandangan surat pengajuannya," jelas Hamka.

Sementara terkait evaluasi penanganan Covid-19 pada tahun 2020 di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan secara baik. Berdasarkan hasil audit BPK RI, secara administrasi dan pertang-

gungjawaban anggaran, pelaksanaan atas penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu tidak ada permasalahan.

"Untuk evaluasi dari BPK sendiri, Provinsi Bengkulu tidak ada permasalahan," demikian Hamka.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan sisa pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dalam waktu dekat akan segera dibayarkan. Saat ini pengajuan masih dalam proses verifikasi.

"Sisa insentif tenaga nakes di RSMY dan di Bapelkes beberapa belum dibayarkan masih dalam proses pengajuan semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai dan bisa dibayarkan," kata Herwan.

Lanjut Herwan, sisa insentif ini akan sekaligus dibayarkan dalam bulan ini. Untuk itu Herwan berharap tenaga nakes dapat bersabar karena proses pencairannya tinggal beberapa tahap lagi. "Tergantung pengajuan kalau pengajuannya cepat, cepat juga pencairannya. Saat ini masih dalam proses verifikasi," jelas Herwan.

Ditambahkan Herwan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu kembali bertambah. Per Kamis (17/12) terdapat tambahan sebanyak 80 kasus baru sehingga total kasus positif hingga saat ini tembus 2.779 kasus. Kasus positif baru ini berasal, dari total sampel swab yang keluar hasil pemeriksannya

sebanyak 313 sampel.

"Dari total sampel hasil pemeriksaan yang keluar diketahui 80 sampel dinyatakan konfirmasi positif Covid-19," terang Herwan.

Kasus baru ini, meliputi yaitu penambahan dari Kota Bengkulu sebanyak 22 kasus, Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1 kasus, Bengkulu Utara sebanyak 30 kasus, Kepahiang sebanyak 15 Kasus, Seluma sebanyak 1 kasus dan Mukomuko sebanyak 11 kasus. Selain terdapat penambahan kasus positif baru, kemarin juga ada penambahan kasus sembuh sebanyak 50 kasus sehingga total kasus sembuh sebanyak 1.814 orang.

"Kemudian, penambahan kasus meninggal sebanyak sebanyak 2 kasus yakni kasus 2.777 asal Kabupaten Seluma dan kasus 2615 asal Kota Bengkulu. Untuk total kasus meninggal dunia sebanyak 100 orang," jelas Herwan.

Herwan mengingatkan dengan melonjaknya kasus Covid-19 saat ini, masyarakat kembali diingatkan bahwa Covid-19 masih mengintai. Sehingga protokol kesehatan, yaitu 3M seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan harus tetap disiplin dilakukan masyarakat. Sebagai upaya dari pencegahan penyebaran Covid-19.

"Paling penting itu upaya pencegahan, dan butuh peran serta masyarakat dengan memperketat penerapan protokol kesehatan," imbuh Herwan. (key)

Predator Seksual Anak Dipenjara,...

Sambungan dari halaman 1

Yang diatur adalah tahapan pelaksanaan dan jangka waktunya. Sementara, prosedur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri kesehatan. Kebiri kimia atau pemasangan alat deteksi elektronik merupakan hukuman tambahan selain pidana pokok. Hukuman itu akan dilaksanakan begitu pelaku selesai menjalani pidana pokok atau keluar dari lapas.

Sebelum dikebiri, pelaku akan menjalani penilaian klinis dari tim dokter dan psikiater. Dia akan menjalani pemeriksaan fisik dan penunjang serta diwawancarai oleh psikiater. Dari situ, tim dokter dan psikiater akan membuat kesimpulan. Apakah pelaku layak untuk dikebiri.

Bila dinyatakan layak, pelaku akan dikebiri di RS disaksikan jaks dan perwakilan Kemenkum HAM, Kemensos, dan Kemenkes. Usai pelaksanaan, jaks wajib memberitahu korban atau keluarganya. Namun, bila kesimpulan klinis menyatakan pelaku tidak layak, bukan berarti dia akan bebas dari hukuman. Kebiri akan ditunda enam bulan untuk penilaian ulang.

Sementara, pemasangan alat deteksi elektronik tidak perlu melalui penilaian klinis sebagaimana kebiri. Begitu pelaku selesai menjalani hukuman pokok, atau paling lama satu bulan sebelum selesai, dia langsung dipasang alat deteksi elektronik. Kemenkes hanya perlu memeriksa dan menentukan bagian tubuh mana yang akan dipasang alat.

Pemberian hukuman tambahan bergantung pada jenis perbuatan. Bila perbuatannya adalah persetubuhan dnegan anak, maka pelaku akan dikebiri plus dipasang alat deteksi elektronik. Sementara, bila perbuatannya masuk kategori pencabulan terhadap anak, hukuman tambahannya berupa pemasangan alat deteksi elektronik saja. Dia tidak akan dikebiri.

Predator seksual anak tidak hanya mendapatkan dua jenis hukuman itu. Sesuai amanat UU 17/2016 tentang pengesahan Perppu Perlindungan Anak, identitas si predator juga akan dipublikasikan. Mulai nama, foto, hingga alamat domisili dia saat ini. PP mengamanatkan publikasi selama satu bulan penuh di berbagai platform yang ada.

Mulai papan pengumuman, web keajaiban, media massa cetak maupun elektronik, hingga media sosial. "Yang dimaksud dengan 'media cetak dan elektronik' termasuk di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal," bunyi penjelasan PP tersebut.

Meski sudah dihukum dan dipermalukan di depan publik, PP memastikan bahwa predator seksual anak juga berhak direhabilitasi. Dia akan mendapatkan rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medik tiga bulan setelah eksekusi hukuman tambahan dilaksanakan. Harapannya, pelaku bisa menjalani kehidupannya dengan wajar setelah keluar dari penjara dan mendapat hukuman tambahan.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu El-

vina menuturkan, PP menjadi salah satu elemen untuk memastikan sebuah UU bisa diimplementasikan. Dalam hal ini, PP 70/2020 akan memberi kejelasan bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan UU 17/2016.

Selama empat tahun terakhir, pelaksanaan amanat UU tersebut memang masih minim. "Data pasti keputusan pengadilan yang menggunakan UU ini yaitu kasus di Mojokerto," terangnya saat dikonfirmasi kemarin (17/12). Kasus yang dimaksud adalah perkosaan terhadap sembilan anak yang dilakukan Muh Aris. Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara plus kebiri kimia.

Menurut Putu, untuk saat ini masih sulit mengukur ataupun mengevaluasi efektivitas hukuman tambahan itu. Apakah akan membuat kejahatan seksual terhadap anak bakal menurun atau efek jera terhadap pelaku, belum bisa dipastikan. "Karena memang pelaksanaan atas vonis berupa tindakan tersebut belum dapat dilaksanakan sampai terpidana selesai menjalani pidana pokok," lanjutnya.

Dalam kasus Mojokerto misalnya, eksekusi baru bisa dilakukan pada 2031. Dengan asumsi Aris sama sekali tidak mendapatkan remisi selama 12 tahun di penjara. UU perlindungan anak mengamanatkan predator seksual anak dipenjara minimal 5 tahun. Bahkan, hukuman ditambah sepertiganya bila pelaku berstatus orang-orang dekat korban, pendidik, aparat, atau pelaku yang melakukan bersama-sama. (byu/jgg)

Sambungan dari halaman 1

Menyikapi proses dan perolehan suara Pilgub, Agusrin-Imron memastikan mengajukan gugatan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Laporan juga ditembuskan ke Bawaslu RI dan KPU RI. "Sementara itu kami ke Bawaslu," kata Jubir Agusrin-Imron, Suryawan Halusi, tadi malam.

Suryawan menyampaikan pihaknya banyak menemukan temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub. "Bahwasanya suara 03 sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa KPPS di kabupaten. Yang telah memberikan pernyataan di atas materi dan rekaman videonya ada. Yang memang saat ini belum bisa kami sampaikan, namun itu sifatnya bisa kami pertanggungjawabkan," sampai Suryawan.

Dikatakannya, bahwa ada perbuatan TMS, yakni terstruktur, masif dan sistematis yang modulusnya adalah pengelembungan suara, membatalkan suara, dan modus modus lainnya. "Dan itu kesaksiannya ada. Dan ketika kita hubungkan bahwa modus itu adalah suara yang tidak sah maka totalnya berkisar 68.000 dan ini sangat fantastis," tambahnya.

Ditambahkan, Irwandi, salah satu tim paslon 03, menyebutkan bahwa ada indikasi kecurangan melalui surat suara. Ia menjelaskan kelebihan surat suara, itu jumlahnya bisa dihitung dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen. Namun, menurutnya ada yang aneh. Pasalnya pihaknya menemukan adanya surat suara melebihi jumlah itu.

"Contohnya di Bengkulu Utara kami sudah hitung ada 182 surat suara yang lebih, Rejang Lebong ada 348 surat suara, Kota 340 surat suara lebih. Maka kita yakin bahwa setiap kabupaten kota surat suara yang didistribusikan oleh KPU Provinsi Bengkulu itu berlebihan," ungkapnya.

Ia pun mencoba membayangkan jika ada 100 surat suara yang dicoblos oleh kandidat lain atau dengan metode kecurangan. Maka sudah berapa suara yang didapatkan. Ini menciderai demokrasi di Bengkulu yang harus bermartabat.

"Yang pasti saya tegaskan kita menuntut keadilan, dan kita minta kepada penyelenggara untuk mengadakan pemilihan ulang di Provinsi Bengkulu," tegasnya.

Namun untuk langkah selanjutnya, ia bersama tim akan berkoordinasi dengan Agusrin-Imron, untuk langkah apa yang selanjutnya



KETERANGAN: Tim Agusrin-Imron menggelar konferensi pers terkait hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara, kemarin.

mereka lakukan.

Terpisah, rencana gugatan itu juru bicara Rohidin-Rosjonsyah, Zulkarnain Kaka Jodho, memperlakukan untuk pihak mana pun yang hendak melakukan gugatan untuk hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara ini.

"Silakan sajalah, tapi rakyat Bengkulu hari ini menghargai sebuah kemenangan itu sebagai suka cita. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat," kata Zulkarnain.

Apalagi tingkat partisipasi masyarakat, lanjut Zulkarnain, meski pun hujan badai itu desaki 80 persen. Artinya golput kecil sekali, dalam Pilkada serentak ini.

"Dan bagi teman-teman 03 mau menggugat silakan saja. Kalau kita mau saling membuka kan, pasti semuanya punya juga. Yang jelas kita saling mendoakan, apalagi pandemi Covid-19 semakin meningkat," tukasnya

Ia pun menyampaikan pesan dari Rohidin Mersyah bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada walikota Bengkulu yang mengeluarkan surat edaran untuk mencegah kerumunan. Selain itu, pihaknya juga mendoakan untuk paslon 03, khususnya Imron Rosyadi agar segera diberikan kesembuhan, pasalnya beliau kini sedang sakit dan dirawat disalah satu rumah sakit kota Bengkulu.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah menyampaikan bahwa Provinsi Bengkulu menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang menggelar rekapitulasi suara Pilkada. Pasalnya sesuai jadwal tanggal 16-20 Desember ini, telah ditetapkan sebagai waktu untuk rekapitulasi perhitungan suara.

"Ini hari kedua ya, namun hari ini (kemarin, red) kita yang pertama menggelar Pleno se-Indonesia, sedangkan Provinsi lain itu rata-rata besok (hari ini, red)," kata Darlinsyah, kemarin.

Dikatakannya, untuk rekapitulasi rencana Pilgub Bengkulu ini, telah diselesaikan oleh KPU ditingkat Kabupaten/Kota. Dimana dalam pelaksanaannya, seluruh hak pilih sudah terlindungi dan tidak ada halangan untuk mendapatkan hak pilihnya.

"Kita juga tidak ada laporan pelanggaran Protokol Kesehatan. Dan dilapangan juga tetap bersinergi," tambah Darlinsyah.

Dalam pleno itu, juga ada rekomendasi dari Bawaslu provinsi Bengkulu, dan dipastikan akan segera ditindaklanjuti terkait rekomendasinya. Dimana selama 3 hari setelah hasil Pleno ditetapkan, maka Paslon berhak untuk menyampaikan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika tidak ada maka tentu akan clear. Mudah-mudahan Pleno yang diagendakan sampai dengan tanggal 20 ini berjalan dengan baik dan tidak ada masalah," tutur Darlinsyah.

Komisioner KPU Provinsi Emex Verzoni menyebutkan ada 2 mekanisme laporan yang dapat disampaikan Paslon jika merasa keberatan dengan hasil Pleno. Di antaranya yakni menyampaikan keberatan ke MK dan Bawaslu.

"Jika soal selisih suara itu ke MK. Kalau soal pelanggaran prosedur, pelanggaran tata cara dan mekanisme itu disampaikan ke Bawaslu," jelas Emex.

Ia menjelaskan bahwa jika memang ada laporan. Maka harus memiliki dasar yang kuat. Ini agar KPU selaku penyelenggara Pemilu dapat menindaklanjuti.

"Sejauh ini belum ada permasalahan. Namun jika memang nanti ada laporan, maka kita imbau Paslon yang melapor itu memiliki bukti yang kongkrit. Dalam hal ini jelas kejadiannya, mulai dari data, kejadian, tempat kejadian, seperti apa kejadiannya dan juga saksi-saksi haruslah jelas," tutupnya. (war)

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KELUARGA BESAR

Hj.Nanny Sudaryani Muslihan DS

**MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA
SEMUA PIHAK UNTUK SEGALA PERHATIAN BAIK MORIL MAUPUN MATERIL
KEPADA KELUARGA BESAR KAMI ATAS WAFATNYA SAMPAI DIMAKAMKANNYA
SUAMI, AYAHANDA, KAKEK YANG KAMI CINTAI " H.MUSLIHAN DS "**
**KAMI MOHON DIBUKAKAN PINTU MA'AF DAN DOA TULUS BAPAK/IBU/SAUDARA/I
AGAR DILAPANGKAN JALANNYA MENGHADAP ALLAH SWT**

1. SELURUH MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU
2. TIM DOKTER,PERAWAT , PARA MEDIS RS.M.YUNUS BENGKULU
3. H. HELMI HASAN (WALIKOTA BENGKULU)
4. H. AGUSRIN M NAJAMUDIN (MANTAN GUBERNUR BENGKULU)
5. DR. OESMAN SAPTA KETUA UMUM DPP PARTAI HANURA
6. DR. H. ROHIDIN MERSYAH (GUBERNUR PROV.BENGKULU)
7. H. DEDY ERMANSYAH (WAKIL GUBERNUR PROV.BENGKULU)
8. JUNAIDI HAMZAH (MANTAN GUBERNUR BENGKULU)
9. BRIGJEN (Purn) ISKANDAR RAMIS (MANTAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU)
10. DEDI WAHYUDI (WAKIL WALIKOTA BENGKULU/PEMDA KOTA BENGKULU)
11. BENNY RAMDANI (KEPALA BP2MI)
12. H.ISDIANTO (GUBERNUR PROV. KEPRI)
13. BRIGJEND YANUAR ADIL (DANREM 041 GAMAS)
14. KODIM 0407 BENGKULU
15. KELUARGA BESAR DPD PARTAI HANURA PROVINSI BENGKULU
16. PT. KAO INDONESIA
17. Drs. HAMKA SABRI (SEKDA PROV.BENGKULU)
18. IR. MIAN & ARIE SEPTIAN ADINATA (BUPATI & WABUP KAB.BENGKULU UTARA)
19. HIDAYATULLAH & NETI HERAWATI (BUPATI KAB.KEPAHIANG)
20. DR.E ROSJONSYAH BUPATI (KAB.LEBONG)
21. H. FERRY RAMLI (BUPATI KAB.BENGKULU TENGAH)
22. CHAIRUL HUDA, SH (BUPATI KAB. MUKOMUKO)
23. H. BUNDR A JAYA (BUPATI KAB. SELUMA)
24. GUSNAN MULYADI BUPATI (KAB. BENGKULU SELATAN)
25. PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
26. DR. HARYADI (SEKDA KAB.BENGKULU UTARA)
27. IRJEN POL (Purn) SUPRATMAN
28. KEL.BESAR KOL (Purn) H. JAFRI SIDIK
29. KEL.BESAR DR. IMRON ROSYADI
30. ZULKIFLI HASAN (WAKIL KETUA MPR-RI)
31. SULTAN B NAJAMUDIN (WAKIL KETUA 2 DPD RI)
32. H. AHMAD KANEDI (DPD-RI)
33. Hj. ELVA HARTATI (DPR RI F-PDIP)
34. SÚSI MARLENI BACHSIN (DPR RI F-GERINDRA)
35. M. SOLEH (DPR RI F-GOLKAR)
36. Hj. DEWI CORYATI (DPR RI F-PAN)
37. KEMENAG PROV.BENGKULU
38. HABIB ABDURAHMAN ALKAF (BAZNAS KOTA BENGKULU)
39. H. RULLY CHAIRUL ANWAR
40. KOMISARIS DIREKSI KARYAWAN BANK BENGKULU
41. dr. ZAYADI HOESEIN Sp.OG
42. PT. BNI 46
43. BCA KCU BENGKULU
44. BPRS MUAMALAT HARKAT BENGKULU
45. KPU PROVINSI BENGKULU
46. YAYASAN DAN RS.RAFLESIA (IRJEND POL (P). SUDIRMAN AIL)
47. KETUA YAYASAN RATU SAMBAN (NOVRIANDI)
48. REKTOR UNRAS (FAISAL ALHABIB)
49. CIVITAS AKADEMI STIA (MARYONO)
50. SELAMAT GRUB (YANTO SG)
51. PT. RODA TEKNINDO (Ir. PURWANTO)
52. MM 88 BENGKULU
53. PT. PULAU BATU INTAN (Ir. SAPARUDDIN)
54. PT. ARSYA RAJENDRA PARKIR ZONA II KOTA BENGKULU
55. CYBER PETSOP BENGKULU
56. KEL.BESAR PANGKAS RAMBUT YANTO SKIP
57. TOKO SAMUDERA IPUH
58. MAYJEND (Purn). BIMO PRAKOSO
59. MUSPANI DAN KELUARGA
60. MAHYUDIN SOBRI
61. GUNADI (SPBU ARGAMAKMUR)
62. KEL. BESAR Alm. DJANG DJAYA
63. KEL.BESAR MULYADI KAHAR
64. KEL.BESAR Bpk. ACHMAD BASRI (NUSA INDAH)
65. KEL.BESAR Alm. MANGUN REJO WAGINEM
66. KEL. AHMAD AZWAR WANCE
67. KEL. YANJE YOHANES
68. KEL.HERI TAHER
69. KEL. Alm H. BADARUDIN KAB.KEPAHIANG
70. KEL. H. NAFIS BAKER
71. AGUNG PRASETIO (KARTIKA SARI ISKANDAR KALIMANTAN)
72. PRANYOTO ATENG BINWIL LAMPUNG&BENGKULU DPP PARTAI HANURA
73. DIAN EKA MUCHAIRI (SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA PROV. KALBAR)
74. DPC PARTAI HANURA KAB.KAUR (RISMADI)
75. SEKRETARIS DPC PARTAI HANURA KAB.KAUR (TRI PUTRA WAHYUNI)
76. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB. BENGKULU SELATAN
77. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB. SELUMA
78. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KOTA BENGKULU
79. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.BENGKULU UTARA
80. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.MEKUMUKO
81. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.KEPAHIANG
82. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB. BENGKULU TENGAH
83. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.KEPAHIANG
84. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.REJANG LEBONG
85. KEL. BESAR DPC PARTAI HANURA KAB.LEBONG
86. KEL. BESAR DPW PARTAI NASDEM PROV.BENGKULU
87. KEL. BESAR DPW PARTAI PAN PROV.BENGKULU
88. KEL. BESAR DPW PARTAI PERINDO PROV.BENGKULU
89. KEL. BESAR DPD PARTAI GERINDRA PROV.BENGKULU
90. H. DADANG MISCHAL KETUA BAPERDA PDI-P PROV.BENGKULU
91. KOPLI ANSORI KETUA DPD PAN LEBONG
92. FACRURROZI CAWABUP KAB.LEBONG
93. USIN ABDISYAH PUTRA S ANGGOTA DPRD PROV. BENGKULU
94. RIA OKTARIA, S.Psi ANGGOTA DPRD PROV. BENGKULU
95. ARSOP DEWANA SE ANGGOTA DPRD PROV. BENGKULU
96. SUDISMAN ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU
97. H. IMRAN HANAFI ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU
98. BAMBANG HERMANTO ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU
99. NOVRI ARDIANTASARI ANGGOTA DPRD KAB.MUKOMUKO
100. SANTOSO, SP ANGGOTA DPRD KAB.BENGKULU UTARA
101. WANSYAH ANGGOTA DPRD KAB. KEPAPIANG
102. RISWANTO ANGGOTA DPRD KAB.KEPAHIANG
103. SUHARDIN, S.SOS ANGGOTA DPRD KAB.REJANG LEBONG
104. FRAKSI PARTAI HANURA DPRD KAB.BENGKULU TENGAH
105. RAHMAT MULYADI FRAKSI NASDEM DPRD KOTA BENGKULU
106. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU
107. FRAKSI PKS DPRD KOTA BENGKULU
108. PD.VII FKPI PROV.BENGKULU (MUFRAN IMRON)
109. KETUA PPM (H.AHMAD KANEDI)
110. DONI SAPUTRA IDRIS (CV. CIPTA GRAFINDO)
111. PUTRAWANJAYA (IMI)
112. LBH ANATASIA PASE
113. DR.HC. MISWARI CORIEN CENTER
114. BANG KAKA FLORIST (DAYAN WAHYUDI)
115. RM. DAPUR PEDAS (WENI SUGIARTI)
116. GAPKI BENGKULU
117. GAPEXO
118. Ir . H. MARWAN RAMIS (MR GROUP)
119. DINSOS PEMDA KOTA BENGKULU
120. FOSIL 2/90 ALUMNI SMP 2 BENGKULU
121. SUPRATMAN, M.Si KETUA RT 02 JALAN GEDANG
122. WARTAWAN & JURNALIS
MEDIA MASA DAN ELEKTRONIK SE PROV.BENGKULU
123. KEL BESAR TOKO PILARIS PEMATANG GUBERNUR
124. SELURUH KARYAWAN UD.HANNY
125. FORKOM 5 MANDUPA PALEMBANG ALUMNI 93
126. YULIAN HERONAFDI (APOTEK AL FATEHAH)
127. dr.DANNIE SAMADHI (KLINIK NABAWI)
128. LAW FIRM "PANCA THA'IM, SH, MH & REKAN
129. WARGA Rt 01 Rw 01 KEL' PADANG NANGKA' KEC SINGGARAN PATI KOTA BENGKULU

"BAPAK/IBU YANG TIDAK BISA KAMI SEBUTKAN SATU PERSATU "

Patuhi Prokes, Pesta Belum Dilarang

ARGA MAKMUR - Terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Bengkulu Utara (BU), belum membuat Pemkab BU mengambil langkah melarang aktivitas berkumpulnya masyarakat. Termasuk pesta pernikahan, akikah maupun lainnya yang kini masih aktif digelar masyarakat.

Bupati BU, Ir. H Mian menjelaskan Pemkab BU sudah menggelar rapat dengan seluruh FKPD.

Hasilnya memang belum memungkinkan untuk melarang aktivitas pesta pernikahan maupun kegiatan lainnya yang bisa digelar masyarakat. Saat ini Pemkab BU melalui Satgas Covid-19 baru memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) terutama di pesta pernikahan. "Artinya jika ada acara pesta yang tidak menerapkan prokes, maka mohon maaf kita akan bertindak tegas," kata

Mian. Meskipun tidak melarang pesta pernikahan, Pemkab BU tetap melarang aktivitas kerumunan yang dinilai tidak penting, seperti acara-acara pesta tahun baru yang biasanya terjadi. Satgas akan melakukan penindakan termasuk pembubaran jika ada masyarakat yang berkumpul. "Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim

dan Kajari. Penertiban akan ditekankan, jika ada kerumunan masyarakat kita bubarkan mengingat terus bertambahnya kasus Covid-19," tegasnya.

Terpisah, Kadis Pendidikan, Dr. Agus Haryanto, SE, MM mengakui sudah terbit SKB empat menteri terkait dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun dengan kondisi sebaran dan penambahan kasus Covid-19 di

BU, ia mengaku Pemkab BU masih berpikir dua kali. "Kita harus pikirkan kembali, karena yang terpenting tentunya kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujarnya.

Saat ini Dikbud BU sudah menerima bantuan perlengkapan penanganan Covid-19 di sekolah dari Kemendikbud berupa tempat cuci tangan, masker dan hand sanitizer yang langsung dibagikan

ke sekolah. Namun hal ini belum membuat Pemkab BU mengambil keputusan untuk memberlakukan PTM awal tahun nanti.

"Kita masih melakukan kajian, karena juga akan diserahkan ke daerah. Melihat penyebaran saat ini, masih sangat rentan terhadap penularan, apalagi sudah ada klaster pendidikan, dan pelajar yang saat ini muncul," ucap Agus. (qia)

Butuh Rp 40,2 Miliar Untuk Gaji Guru PPPK

ARGA MAKMUR - Pemkab BU akan mengikuti rakor di KemenPAN-RB membahas persiapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru non PNS, hari ini. Namun syarat guru honorer yang bisa mengikuti tes PPPK yakni wajib sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan Dapodik, tercatat 1.600 guru non PNS di BU yang berhak mengikuti seleksi PPPK dalam program sejuta guru yang digagas Kemendikbud 2021 mendatang. Namun, untuk mengangkat 1.600 guru tersebut, BU harus menyiapkan setidaknya Rp 40,2 miliar untuk gaji PPPK tersebut tahun depan.

Berdasarkan Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, gaji terendah PPPK Rp 1.794.900 per bulan dengan jumlah pembayaran sebanyak 14 bulan termasuk gaji ke-13 dan THR. Jika dikalikan dengan 1.600 guru honorer yang berpeluang mengikuti tes selama 2021 artinya gaji PPPK akan menguras APBD paling sedikit Rp 40,2 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) BU, Drs. Setyo Budi Raharjo, M.Pd menerangkan dalam rapat pertama, syarat peserta seleksi PPPK harus terdaftar di Dapodik. Pelaksanaan tes juga bisa dilakukan lebih dari dua kali setahun hingga memenuhi kuota sejuta guru. "Namun rakor besok (Hari ini, red) akan kita pertegas lagi. Bagaimana teknisnya," kata Budi.

Ia mengakui PPPK dibayar melalui APBD, bukan APBN. Sehingga setelah dilakukan pengangkatan, mereka akan menerima gaji sesuai dengan Perpres yang dianggarkan dalam APBD. "Sepenuhnya ditanggung APBD. Sehingga semuanya harus dipertimbangkan oleh daerah. BK-PSDM hanya menangani terkait detail pelaksanaan tes dan penerimaan PPPK," terang Budi. (qia)



SK CPNS: Sekda BU, Dr. Haryadi menyerahkan SK kepada 45 CPNS BU, Kamis (17/12).

CPNS Tidak Boleh Mengeluh

Jika Ditugaskan di Daerah Terpencil

ARGA MAKMUR - Sekda BU, Dr. Haryadi, MM, M.Si mengingatkan pada 45 CPNS yang dilantik kemarin, untuk tidak mengeluh terkait tempat tugas masing-masing. Sebab dari 45 CPNS yang dilantik kemarin, mayoritas ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari ibukota kecamatan.

Diantaranya ditugaskan di Kecamatan Enggano, Napal Putih, Ulok Kupoi dan daerah terpencil lainnya. Ia men-

egaskan tidak ingin menden- gar ada CPNS yang mengeluh karena tempat tugas.

"Kalian yang memilih tempat tugas, mengabdikan. Jangan ada saya mendengar CPNS yang dilantik hari ini mengeluh karena tempat tugas yang jauh dari keramaian," tegas Haryadi.

Ia juga mengingatkan CPNS tidak boleh mengajukan pindah tugas minimal selama 10 tahun bertugas. "Kita juga dalam melakukan rotasi PNS melihat kebutuhannya dan kemampuan PNS masing-masing. Jika memang kita nilai tidak layak atau lebih dibutuhkan di tempat semu-

la, tentunya tidak akan ada rotasi," ujarnya.

45 CPNS yang dilantik kemarin akan menerima gaji per 1 Januari 2021 dengan besaran gaji 80 persen. Mereka baru akan diangkat sebagai PNS setelah satu tahun bertugas dan mengikuti diklat pra jabatan. "Saya

juga meminta CPNS yang dilantik untuk segera ber-

tugas secepatnya, paling lambat Senin sudah harus melapor ke kepala instansi masing-masing. Kecuali untuk Kecamatan Enggano yang harus menunggu keberangkatan kapal," jelas Haryadi. (qia)

APBDes Tunggu PMK dan Perbup

ARGA MAKMUR - Hingga kini desa-desa belum bisa merancang APBDes untuk tahun anggaran 2021. Penyebabnya belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang belanja dana desa 2021 yang masih harus ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup).

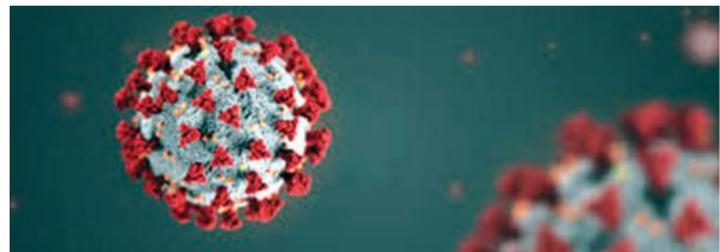
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Ir. Budi Sampurno mengatakan sudah ada ketegasan beberapa item belanja yang harus dilaksanakan oleh desa melalui DD. Namun

teknis besarnya belum bisa ditentukan. "Karena besaran dan waktu pelaksanaan akan diatur dalam PMK, namun PMK belum terbit," ujarnya.

Salah satu yang menonjol untuk belanja pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kementerian Keuangan sudah menegaskan desa harus tetap menganggarkan DD bagi masyarakat kurang mampu sebagai program pemulihan ekonomi nasional. "Namun besarnya berapa dan selama berapa bulan belum ditentukan.

Makanya saat ini belum bisa dirancang APBDes," terang Budi.

Jika berkaca dari Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan Kemensos, ada pengurangan jumlah besaran dari Rp 300 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan hingga Juni 2021. Namun belum jelas apakah pengurangan itu juga berlaku pada BLT DD atau tidak. "Kita belum bisa menerka-nerka. Karena yang ditegaskan baru sebatas BLT tersebut ada di DD tahun 2021, namun teknisnya belum," beber Budi. (qia)



100 Kasus Positif Dalam 22 Hari

ARGA MAKMUR - Kasus Covid-19 di Bengkulu Utara terus meledak. Bahkan dalam 22 hari belakangan, hingga kemarin, terjadi penambahan sebanyak 100 kasus positif Covid-19 yang merupakan warga BU. Kemarin tercatat kasus tinggi sepanjang pandemi Covid-19 di BU dimana muncul 30 kasus dalam sehari.

Saat ini tercatat 196 kasus warga BU yang terpapar Covid-19. Tercatat 10 kasus warga BU meninggal dengan status positif Covid-19, dan 126 kasus sembuh. Masih ada 60 warga BU yang masih berstatus positif Covid-19 hingga saat ini.

Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

(P2P) Dinas Kesehatan BU Ujang Ismail, SKM, M.Ph mengatakan dari 60 kasus tersebut, mayoritas melakukan isolasi mandiri. Mereka kasus positif yang berstatus Orang tanpa Gejala (OTG).

"Ada juga yang gejala ringan dan diizinkan melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan tim medis dan Satgas kecamatan dan desa," terangnya.

Dari penambahan kasus positif kemarin, terdapat satu kasus balita yang masih berumur satu tahun dan dua anak berumur 11 tahun yang masih berstatus pelajar. Saat ini ada lebih dari 8 kasus positif Covid-19 yang dialami oleh pelajar, baik tingkat

SD, SMP maupun SMA.

"Rata-rata mereka mendapat penularan dari keluarganya yang kita ketahui berdasarkan hasil tracing. Mereka juga berstatus tanpa gejala," jelas Ujang.

Ia juga meminta Satgas Covid-19 tingkat desa melakukan pengawasan pada warga yang melakukan isolasi mandiri. Sehingga memastikan penderita tidak melakukan aktivitas di luar rumah maupun tidak melakukan kontak erat dengan warga lainnya.

"Kita terus berusaha menghindari terjadinya penularan secara meluas. Itu hanya bisa dilakukan dengan kesadaran masyarakat dan penderita tersebut," ujar Ujang. (qia)

Tak Kenal Maka Tak Kebal

Vaksin melatih tubuh untuk **kenal**, lawan, dan **kebal** dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri.



Pembangunan Tugu Bundaran Jaya Belum Selesai

Dinas PUPR Minta Dikebut

SELUMA - Tahun ini, ada sekitar 31 paket item pekerjaan fisik yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma. Pada saat ini seluruh item pekerjaan itu telah berjalan dan beberapa diantaranya telah selesai. Hanya tersisa satu item pekerjaan yang belum terselesaikan. Yakni pembangunan Tugu Bundaran Jaya di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi. Untuk itu, Dinas PUPR Seluma meminta agar rekanan bisa menyelesaikannya tepat waktu sebelum akhir tahun nanti.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seluma, Muhammad Syaifulloh, SE, ST mengatakan bahwa sejumlah paket pekerjaan fisik di tahun anggaran 2020 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma maupun dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dikebut penyelesaiannya. Hal ini terbukti dari 31 paket yang dikerjakan itu, hanya tersisa satu paket saja yang belum tuntas saat ini. Yakni pada pembangunan Tugu Bundaran Jaya yang dikerjakan secara Penunjukan Langsung (PL).

"Yang lainnya tinggal proses pencairan, yang belum selesai hanya satu paket PL saja yaitu pembangunan tugu Bundaran Jaya," ujarnya.

Diketahui, pembangunan Tugu Bundaran Jaya itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 100 juta. Tugu tersebut dibangun dengan motif atau desain lenguai atau sekapur sirih. Yakni, salah satu adat di Selatan. Pihaknya berharap pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dan tidak melebihi batas kontrak yang ada.

"Mudah-mudahan seluruh pekerjaan fisik dapat terselesaikan akhir tahun ini," pungkasnya.

Diketahui, pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk di bidang Cipta Karya yakni pelaksanaan pembangunan rumah dinas Kajari Seluma dengan anggaran Rp 1 miliar, rumah dinas Polres Seluma dengan anggaran Rp 1,7 miliar, pembangunan gedung Saber Pungli dengan anggaran Rp 500 juta. Serta Spam Sanitasi dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan untuk di Bidang Bina Marga yakni di Desa Kuti Agung dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar dan di Desa Air Periukan dengan anggaran sebesar Rp 700 juta. Pengerjaan pembangunan Box culvert dengan anggaran Rp 900 juta yang dilaksanakan di Kelurahan Napal dan di Kelurahan Pasar Tais dengan anggaran sebesar Rp 190 juta. Pembangunan tugu Bundaran Jaya dengan anggaran sebesar Rp 100 juta di Desa Padang Capo Kecamatan Lubuk Sandi. Serta pada program karya bakti di dua titik yaitu di Desa Arang Sapat dengan anggaran Rp 750 juta dan di Desa Talang Durian dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar. (cup)



RAKOR: Rakor kesiapan Ops Lilin Nala 2021 di Mapolres Seluma, kemarin.

21 Desember, Ops Lilin Nala Digelar

SELUMA - Menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Nala tahun 2020 yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 21 Desember mendatang, Polres Seluma telah melakukan persiapan. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru 2021 di wilayah Hukum Polres Seluma. Adapun fokus operasi ini adalah penerapan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi saat ini.

"Saat ini sudah mulai persiapan, operasi ini akan dimulai pada tanggal 21 Desember mendatang," sampai Kapolres Seluma, AKBP Switanto Prasetyo, S.Ik melalui Kasat Lantas, Iptu Jangkung Riyanto.

Jangkung juga menambahkan, dalam giat Operasi Lilin Nala 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Operasi ini nanti digelar selama 14 hari terhitung mulai dari 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Yaitu mengutamakan penerapan disiplin protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Juga untuk mengimbau agar tidak mengadakan kerumunan massa pada perayaan Natal dan tahun baru.

"Pelaksanaan operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari, hingga tanggal 4 Januari nanti, fokus operasi ini disiplin prokes," lanjutnya.

Selain itu, juga akan ada patroli yang dilaksanakan Polres Seluma. Yakni terutama dikawasan yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat seperti lokasi wisata dan lainnya. Apabila nantinya ditemukan ada kegiatan yang mengundang banyak massa maka akan dibubarkan. Mengingat Polres Seluma tidak mengeluarkan izin keramaian hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. (cup)

Perangkat Dua Desa Terancam Tak Gajian

SELUMA - Menjelang penutupan tahun, ternyata masih ada dua desa yang sama sekali belum melakukan pencairan anggaran dana desa (ADD) sejak Januari lalu. Dua desa itu ialah Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM). Melihat hal ini, Pemkab Seluma melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma masih mengupayakan langkah

terbaik. Sehingga khusus dua desa tersebut masih diberikan perpanjangan waktu hingga pekan depan. Plt Kepala Dinas PMD Seluma, Drs Agus Jun Fadhillah mengatakan bahwa memang pihaknya saat ini masih mengupayakan untuk mencari solusi terbaik bagi dua desa tersebut. Namun solusi tersebut itu tentunya tetap merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Seluma.

Mengingat batas akhir pencairan ADD telah selesai yaitu pada tanggal 15 Desember lalu, pihaknya memberikan toleransi. Berupa perpanjangan waktu untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan hingga pekan depan. Hal ini juga dilakukan sembari menunggu hasil rekomendasi dari Dirjen Bina Pembinaan Desa. "Ya, masih kita upayakan, karena ADD ini kan untuk operasional, sifatnya

penting, jadi masih kita upayakan dengan Pemkab Seluma," ujar Agus. Agus menambahkan, pihaknya juga menyiapkan opsi lain untuk dua desa tersebut. Yaitu apabila tidak menyertakan persyaratan yang diminta oleh Pemkab Seluma maka pihak desa diminta untuk membuat berkas pengajuan tanpa menganggarkan pembayaran gaji untuk perangkat desa. Sehingga pembayaran gaji itu sendiri

hanya untuk kepala desa, BPD, pengurus masjid dan lainnya yang di luar jabatan perangkat desa. Apabila masih ingin membayarkan gaji perangkat desa maka diminta untuk mengikuti peraturan yang ada. "Jika ingin dicairkan ada opsi lainnya, tapi masih kita rembukkan dahulu. Intinya kita usahakan ADD itu bisa dicairkan, kita minta mereka segera mengusulkan berkas kembali," pungkasnya. (cup)



RAMAI: Tampak masyarakat yang ramai mendatangi Kantor BRI untuk melakukan pencairan BLT UMKM pada Selasa (15/12) lalu.

Antisipasi Pungli BLT UMKM

SELUMA - Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp 2,4 juta sedang dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan Desember ini. Untuk itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Seluma meminta agar masyarakat melaporkan apabila terjadi praktek pungutan liar. Pasalnya, dalam bantuan ini tidak ada pemotongan sepeserpun. Juga masyarakat yang menerima bantuan ini diminta untuk mengikuti protokol kesehatan (prokes) dan tidak bergerombol saat melakukan pencairan bantuan di Kantor Bank BRI.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Seluma, Mulyadi SSos MM mengatakan bahwa memang saat ini proses pencairan bantuan tengah berlangsung di Kantor Bank BRI. Untuk itu, pihaknya mengingatkan

bahwa dalam penyaluran BLT ini tidak ada pemotongan sepeserpun baik dari pihak dinas maupun lainnya. Para penerima berhak menerima bantuan sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan yaitu Rp 2,4 juta. Apabila ada oknum-oknum yang melakukan pemotongan, maka itu bisa dikatakan pungli. Sehingga jika ditemukan adanya hal demikian, pihaknya meminta untuk segera dilaporkan ke kantor Disperindagkop Seluma. Ini untuk mencegah adanya oknum-oknum nakal yang sengaja mencari kesempatan.

"Jika ada yang demikian segera dilaporkan ke kita ataupun kepolisian, karena bantuan ini tidak ada potongannya. Para penerima akan menerima uang sebesar Rp 2,4 juta," jelasnya.

Selain itu penyaluran bantuan ini sempat mendadak menjadi bahan

perbincangan. Hal itu dikarenakan dalam proses pencairannya, para penerima yang menerima SMS pemberitahuan datang bergerombol di Kantor BRI. Untuk itu, pihaknya meminta untuk masyarakat yang menerima bantuan agar bisa lebih tertib. Yaitu dengan datang bergantian atau tidak berkerumunan di depan Kantor Bank BRI. Selain itu juga untuk mengikuti protokol kesehatan berupa menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan terlebih dahulu dan lainnya. Juga diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan karena bisa menyebabkan kemacetan.

"Ini juga, kita ingatkan agar mereka tidak bergerombol datangnya, ini sedang pandemi jadi kita harap bisa mengikuti prokes, semoga kedepan tidak demikian lagi," pungkasnya. (cup)



RESMIKAN: Dandim 0425/Seluma saat meresmikan bangunan masjid yang didirikannya di Kelurahan Napal, kemarin.

Dandim 0425/Seluma Dirikan Masjid

SELUMA - Sebuah masjid yang ada di RT 9 RW 3 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma diresmikan oleh Dandim 0425/Seluma pada Kamis (17/12) pagi. Masjid ini diresmikan setelah dibangun tepat setahun menjabatnya Dandim 0425/Seluma saat ini. Adapun pembangunan masjid ini dilakukan lantaran di sekitaran sana belum ada rumah ibadah. Tentunya hal ini bisa menjadi contoh teladan untuk lainnya.

Dandim 0425/Seluma, Letkol. Czi. AM. Limbong ST MTr (Han) mengatakan alasannya mendirikan masjid yang diberi nama Miftahul Jannah ini mengingat di sekitar lokasi itu belum memiliki bangunan masjid ataupun musala

untuk tempat ibadah. Hal tersebut membuat ia berinisiatif untuk melakukan pembangunan masjid di sekitar lokasi. Karena selama ini, masyarakat maupun anggota yang tinggal di perumahan Kodim harus menempuh jarak sekitar 1 kilometer untuk pergi beribadah ke masjid terdekat.

"Atas dasar itulah kita berinisiatif untuk melakukan pembangunan masjid ini," terang Dandim.

Masjid Miftahul Jannah tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran dari Swadaya dan tenaga Swadaya anggota Kodim 0425/Seluma. Berkat motivasi yang tinggi sehingga masjid tersebut dapat diselesaikan dan pada saat ini sudah dapat di-

manfaatkan baik untuk anggota maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Dengan dibangunnya Masjid Miftahul Jannah tersebut, Dandim 0425/Seluma berharap kepada seluruh anggota Kodim 0425/Seluma. Khususnya yang ada di Perumahan Kodim 0425/Seluma. Serta masyarakat yang berada di sekitar Perumahan Kodim 0425/Seluma. Untuk dapat beribadah di Masjid Miftahul Jannah yang telah didirikan tersebut.

"Kita harapkan, masjid ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Mudah-mudahan dengan dibangunnya masjid ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat," harapnya. (cup)

Kasus Positif Kembali Bertambah

Tidak Ada Klaster Baru

SELUMA - Angka pasien positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Seluma kembali mengalami peningkatan. Sudah bertambah empat kasus terbaru yang ditemukan. Keempatnya langsung menjalani isolasi mandiri di rumahnya dan tetap mendapatkan pemantauan dari tim medis.

Melihat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma langsung bergerak. Yakni melakukan upaya pemutusan mata rantai agar tidak terbentuk klaster baru. Itu dilakukan dengan menggelar swab tes massal terhadap kontak pasien.

Melihat ini, Dinas Kesehatan Rudi Syawaludin, S.Sos melalui Kabid Pencegahan dan pengendalian penyakit, Ahmad Tavip SIP membenarkan hal tersebut. Dimana awalnya ada 19 pasien positif yang sedang menjalani masa karantina. Kemudian, setelah itu ada pasien yang dinyatakan telah sembuh dan ada juga penambahan kasus terbaru. Untuk pasien yang telah dinyatakan sembuh itu sendiri cukup banyak yakni berjumlah 14 orang. Sedangkan untuk penambahannya berjumlah 4 kasus terbaru. Semua pasien yang positif terpapar Covid tersebut menjalani masa karantina di rumahnya masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan dari tim medis. Lantaran mereka tidak memiliki gejala penyakit penyerta sehingga tidak perlu mendapatkan perawatan medis.

"Ya, jadi sekarang itu ada 9 pasien positif yang ada, ini karena bertambah 4 kasus baru," sampai Tavip.

Tavip menambahkan, untuk semua kasus tersebut tidak ditemukan adanya klaster baru. Hal ini dikarenakan pihaknya langsung melakukan upaya pencegahan dengan melakukan tracking dan swab massal kontak pasien. Tracking ini sendiri dilakukan kepada 4 pasien yang baru dinyatakan positif setelah hasil swabnya keluar. Pasien tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma.

"Untuk tracking langsung kita lakukan, alhamdulillah untuk klaster baru tidak ada," lanjutnya.

Dirinya juga mengingatkan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar tidak kelelahan. Selain itu juga diingatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menerapkan protokol kesehatan.

Juga untuk memeriksakan kesehatan apabila telah melakukan perjalanan keluar daerah. Untuk itu, dirinya meminta agar masyarakat kembali menggiatkan penerapan protokol kesehatan dalam beraktifitas. Seperti menggunakan masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Juga tak lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat.

"Kita minta demikian, jangan longgar untuk menerapkan protokol kesehatan, juga jangan lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh," sampainya.

Sementara itu, untuk rencana swab lanjutan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma dan masyarakat yang kontak terhadap pejabat yang hasil Swab positif dan telah meninggal dunia diundur. Untuk pelaksanaan swab itu, petugas medis RSUD Tais masih akan menunggu jadwal. Mengingat pada saat ini masih banyak yang sibuk menjelang akhir tahun. Setidaknya ada sekitar 46 orang lagi yang masih akan menjalani swab tes.

"Direncanakan swab akan dilakukan segera, kita harapkan kepada masyarakat yang merasa melakukan kontak dengan pasien dapat mengikuti swab itu," pungkasnya. (cup)

INFO HOTEL



HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX / HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	Jl. Bakti Husada No. 88 Kel. Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	Jl. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858



Dharma Wanita Persatuan
Peran Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Era Digital untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan Indonesia

PENGURUS DWP BS 2020-2024

- Pembina : Sekda BS Yudi Satria, SE, MM
- Penasehat : Nurmawati Gusnan
- Ketua : Ferida Yudi
- Sekretaris : Harlenawati Siswanto

DWP BS Hadir untuk Masyarakat di Tengah Pandemi

KOTA MANNA - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) hadir di tengah masyarakat dengan membantu warga dan sosialisasi pencegahan virus Corona.

DWP BS memasuki usia ke-21, oleh sebab itu DWP BS memperingatinya dengan kegiatan positif di tengah pandemi Covid-19. Adapun tema DWP ke-21 yakni "Peran Dharma Wanita Persatuan dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia".

Dalam sambutannya, penasehat DWP BS Ny. Nurmawati Gusnan menyampaikan, pihaknya harus memberikan dampak positif pada warga BS melalui seluruh anggota DWP yang tersebar di BS. Berbagai rangkaian kegiatan disebutkan mulai dari kegiatan sosialisasi pencegahan virus Corona, memberikan bantuan pada warga kurang mampu dan lainnya.

"DWP hadir dalam bentuk memberikan manfaat untuk warga. Masa pandemi ini dimanfaatkan untuk selalu galakan protokol kesehatan," ujar Nurmawati dalam perayaan HUT DWP kemarin (17/12).

Sementara itu, berkenaan dengan tema HUT DWP ke-21, Nurmawati mengaku perkembangan dunia digital saat ini semakin berkembang. Keharmonisan rumah tangga keluarga tetap menjadi prioritas mewujudkan masyarakat yang tentram.

Peran wanita tambah Nurmawati sangat penting, dengan memberdayakan perempuan di era teknologi tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya ketahanan rumah tangga. (tek)



SAMPAIKAN: Bupati BS Gusnan Mulyadi bersama tim gugus tugas penanganan Covid-19 menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di BS Kamis (17/12).

Tidak Boleh Lagi Ada Kerumunan

26 Warga BS Positif Covid-19

KOTA MANNA - Kasus Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten BS, terbaru ada 26 pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif sementara empat lainnya meninggal dunia.

Rilis Satgas Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Bupati BS Gusnan Mulyadi bersama Kapolres, Kasdim dan stakeholder lainnya dilakukan di rumah dinas bupati BS kemarin (17/12).

Dalam rilis ini disampaikan ada 26 pasien yang terkonfirmasi Covid-19. Bahkan dari jumlah tersebut empat pasien sudah dinyatakan meninggal dunia.

Sehingga melihat lonjakan

kasus yang terus meningkat, maka Pemkab BS bersama stakeholder lainnya, langsung mengambil beberapa langkah mengenai pemutusan sebaran virus ini. salah satunya meniadakan lagi bentuk kerumunan massa, bahkan untuk ASN pun mulai melakukan pekerjaan dari rumah.

Sebab hasil deteksi yang dilakukan, sebaran Covid-19 berasal dari kluster kerumunan, bukan dari kelompok

ASN maupun pendatang baru. "Pemkab mengambil langkah tegas, saat ini semua bentuk kerumunan ditiadakan," tegas Gusnan didampingi tim Satgas Covid-19.

Sementara itu, Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK menegaskan, pihaknya memastikan menindak tegas apabila masih ada warga yang nekat menggelar kerumunan massa. Sebab pihak kepolisian tidak ingin wabah ini berkembang

lebih besar dari yang sekarang.

Adapun kerumunan yang sering terjadi disebutkan Kapolres pesta pernikahan, takziah hingga acara lainnya.

"Kerumunan dalam bentuk apapun ditegaskan tidak boleh lagi, anggota akan terus memantau dan akan memberikan sanksi apabila ada yang nekat membuat kerumunan," tegas Kapolres. (tek)

Oknum ASN Kaur Siap Kembalikan Uang Calo CPNS

KOTA MANNA - Setelah belalu beberapa waktu, akhirnya perkara dugaan penipuan CPNS yang diduga dilakukan oleh salah seorang ASN asal Kabupaten Kaur berinisial MK akhirnya berujung perdamaian. Namun perdamaian tersebut harus ada pengembalian sejumlah uang tunai yang sempat distorkan oleh Veronica Wijaya kepada terduga calo CPNS, MK.

Meski sempat menjalani masa penahanan selama beberapa hari, lantaran dilaporkan melakukan aksi penipuan CPNS, akhirnya MK seorang perempuan yang juga berprofesi sebagai ASN Kaur sepakat berdamai dengan pelapor yakni Veronica Wijaya warga Kecamatan Seginim, Kabupaten BS.

Dalam perdamaian itu, pihak Veronica sepakat untuk tidak meneruskan laporan ini ke aparat kepolisian karena terlapor yakni, MK bersedia mengganti uang yang sudah distorkan oleh veronica sebesar Rp 450 juta.

Namun mekanisme pelunasan dilakukan dengan cara menjual aset milik MK sebagai solusi pengembalian uang tu-

nai milik Veronica yang sudah distorkan kepada MK.

Oleh sebab itu, Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK melalui Kanit Pidum Ipda. M. Bintang Azhar mengakui, laporan pengaduan sudah dicabut.

Disebutkan Bintang, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, sehingga

apapun tuntutan Veronica tidak ada lagi di Satreskrim Polres BS.

"Sudah, sudah dicabut, kedua belah pihak sepakat damai," ujar Bintang. Sehingga pihak kepolisian berharap kedua belah pihak bisa sepakat untuk berdamai dan tidak membuat gaduh karena perkara dugaan penipuan CPNS tersebut. (tek)



SERAHKAN: Penyerahan piala lomba, lanjut foto bersama rangkaian HUT DWP BS yang diserahkan oleh pengurus DWP penasehat DWP, Ketua DWP Ny. Ferida Yudi dan Sekretaris DWP Ny. Harlenawati Siswanto.



POTONG: Potong tumpeng dilanjutkan foto dalam perayaan HUT DWP ke-21 oleh pengurus DWP BS yang dikomandoi penasehat DWP BS Ny. Nurmawati Gusnan.



DWP BS Sukses Rayakan Rangkaian HUT ke-21

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bengkulu Selatan (BS) sukses merayakan HUT DWP ke-21 kemarin (17/2). Berbagai rangkaian HUT DWP BS mulai dari bakti sosial, lomba membaca, hingga sosialisasi Covid-19 di tengah masyarakat BS. (tek/prw)



SAMPAIKAN: Penyampaian sambutan lomba perayaan HUT DWP oleh Wakil Ketua I Ny. Astuti Aswan.



LINTAS



ZONA: BPN Kaur saat deklarasi zona integritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BPN Kaur Bangun Zona Integritas

KOTA BINTUHAN - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaur. Kemarin (17/12) BPN Kaur mendeklarasikan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkungan BPN Kabupaten Kaur. Pembangunan zona integritas berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan BPN Kabupaten Kaur.

Dengan terbentuknya zona integritas, maka ke depan BPN akan lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kaur. Untuk mewujudkan semua ini, BPN Kaur tentunya butuh dukungan dari semua pihak. Demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik, maju, modern, berstandar dunia, profesional dan terpercaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPN Kaur Bambang Kus Indarto dalam pembukaan pembangunan zona integritas kemarin.

Hadir juga dalam kesempatan itu Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, M.Si, kemudian Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH, Ketua PN Bintuhan Purwanta, SH, MH, Pabung 0408 Bengkulu Selatan Kapten Inf Henry Marpaung, Kabagren Polres Kaur AKP Lumban Raja dan para tamu undangan lainnya. Termasuk juga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur.

"Zona integritas ini kita bangun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaur. Dan tahun 2021 yang akan datang banyak program pelayanan kita yang akan kita luncurkan salah satunya pelayanan satu hari selesai dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan, jika tidak maka kita akan tergilas oleh perubahan di era globalisasi. Untuk itu kita sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Kaur untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun saat ini SDM yang ada masih terbatas namun kita ingin tetap bersemangat melakukan yang terbaik," jelas Kepala BPN Kaur, Bambang Kus Indarto.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan kalau pembangunan zona integritas meliputi pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian juga pembangunan mental dan spiritual yaitu pembangunan pola pikir, sikap dan perilaku di jajaran BPN Kaur. Yang semuanya nanti diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Terpisah, Sekda Kaur sangat menyambut baik pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh BPN apalagi di zaman modern saat ini. Bahkan pihaknya sangat mendukung, sehingga semua informasi terkait pengurusan tanah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat kedepannya. "Kita tentunya sangat mendukung, dengan adanya zona integritas ini pelayanan BPN Kaur kedepan akan lebih baik lagi. Dan inilah yang memang saat ini diharapkan oleh masyarakat," pungkask Nandar Munadi. (cik)



Gusril Pausi, S.Sos, M.Ap Bupati Kaur dan Hj. Yulis Suti Sutri, S.KM Wakil Bupati Kaur

Nandar Munadi, S.Sos, M.Si Sekda



LANTIK: Sekda Kaur saat melantik dan menyerahkan berkas PNS baru tahun 2020.

Sekda Ingatkan PNS Baru Taat Aturan

KOTA BINTUHAN - Sebanyak 234 CPNS hasil penerimaan tahun 2018 yang lalu kemarin (17/12) resmi menjadi PNS di lingkungan Pemkab Kaur. Pelantikan dan pembagian SK ini disampaikan langsung oleh Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, M.Si di Taman Benika.

Dalam kesempatan itu Nandar Munadi dengan tegas mengatakan kalau masa depan dan karier PNS yang baru dilantik masih sangat panjang. Bahkan ada yang lebih dari tiga puluh tahun baru pensiun. Untuk itu Nandar Munadi mengingatkan para PNS yang baru agar berhati-hati dalam menjalankan tugas. Tidak menutup kemungkinan dari 234 PNS yang baru dilantik nanti akan menjadi pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kaur. Untuk itu Nandar berpesan agar PNS dalam menjalankan tugas nantinya harus tetap mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi dalam mengambil sebuah kebijakan, karena jika melanggar sudah pasti akan berhadapan dengan hukum.

"Pesan saya kalian dalam menjalankan tugas nantinya ikutilah aturan yang berlaku agar bisa selamat. Kalau umur panjang, bisa pensiun pada umur 58 tahun atau umur 60 tahun bagi pejabat eselon II. Untuk kalian semua harus memahami semua aturan yang ada termasuk perkembangannya. Karena setiap tahun selalu ada yang berubah untuk itu jangan malas untuk mengetahui semua aturan yang berlaku dalam kita menjalankan tugas. Apalagi dalam mengambil kebijakan itu harus benar-benar menjadi perhatian kita PNS agar tidak salah dan melanggar hukum," ungkap Nandar Munadi.

Nandar juga mengucapkan selamat kepada 234 PNS baru yang kurang lebih

dua tahun telah berhasil menghadapi ujian. Karena jika selama dua tahun kerjanya selama menjalankan tugas tidak baik maka para PNS tersebut belum bisa diangkat jadi PNS. Namun saat ini semua PNS baru sudah diangkat dan menjadi PNS penuh sejak dilantik kemarin.

"Sebagai PNS baru saya berharap kalian dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terus berkarya untuk pembangunan Kaur dalam bidangnya masing-masing," pungkask Nandar Munadi.

Hadir dalam pelantikan CPNS menjadi PNS kemarin hanya beberapa kepala OPD saja. Salah satunya Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal Adelin dan juga Kepala Inspektorat Kaur Three Marnope. Pelantikan PNS baru kemarin juga dilakukan sangat sederhana dan ditempatkan terbuka. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. Semua peserta wajib menggunakan masker dan juga mengatur jarak untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Mereka yang dilantik dan mendapatkan SK PNS penuh sebanyak 234 orang PNS. Yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 148 orang. Kemudian tenaga teknis sebanyak 31 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 55 orang. Dengan rincian sebanyak 30 orang adalah PNS golongan II dan sebanyak 204 orang merupakan PNS golongan III. Terhitung Januari 2020 yang akan datang mereka sudah mendapatkan gaji full seperti PNS sebelumnya.

"Alhamdulillah tahun ini 234 CPNS sudah diangkat jadi PNS tahun ini. Sebenarnya target kita pertengahan tahun 2020, namun karena Covid-19 sehingga baru dapat kita laksanakan hari ini," pungkask Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal Adelin. (cik)

Tunggakan Pajak DD Capai Rp 3 M

Tahun 2019 dan 2020

KOTA BINTUHAN - Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Kaur, masih banyak desa yang belum melunasi pajak dana desa (DD), tahun anggaran 2019 dan 2020. Padahal DD tersebut sudah terasap sepenuhnya.

Kepala Inspektorat Kaur Three Marnope saat dikonfirmasi kalau saat ini masih banyak kades yang membandel dan tidak membayar pajak DD. Pada tahun 2019 berdasarkan data yang ada kurang lebih ada 102 desa lagi yang belum membayar pajak tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 ini ada sekitar 114 desa yang belum bayar pajak DD. Hingga jumlah tunggakan pajak DD selama dua tahun ini lebih dari Rp 3 miliar.

"Kita sudah sampaikan kepada desa dan suratnya sudah kita sampaikan juga ke pihak kecamatan untuk mengingatkan desa-desa yang belum bayar pajak DD untuk segera. Karena mengingat akhir tahun ini semua kegiatan dan pencairan DD sudah hampir tuntas dan tutup buku. Karena jumlah desa yang belum bayar pajak sampai saat ini banyak bahkan ada yang dua tahun belum bayar juga banyak," kata Three Marnope.

Untuk diketahui, tahun 2019 pajak DD yang masuk

dari desa baru Rp 1,2 miliar. Tahun 2020 ini pajak DD yang sudah masuk Rp 1,4 miliar lebih. Jumlah ini belum setengah dari jumlah desa yang membayar pajak. Maka dipastikan dalam satu tahun itu ada sekitar Rp 3 miliar lebih pajak untuk DD di Kabupaten Kaur. Sama seperti tahun sebelumnya pihak Inspektorat Kaur akan menajalin kerjasama dengan Kejari Kaur untuk menagih pajak yang belum dibayar nantinya.

Dari tahun 2019 dan 2020 dari data yang ada di Inspektorat masih banyak desa yang belum bayar pajak tahun 2019 dan 2020. Bahkan dari 192 desa, ada 70 desa yang belum sama sekali membayar pajak DD tahun 2020 dan 2019 yang lalu. Sehingga pajak tersebut pun menumpuk dan akan sulit nantinya dibayarkan. Kendati demikian pihak Inspektorat saat ini hanya mengimbau dan berharap kades dapat melunasi pajak DD tersebut.

"Untuk desa yang belum bayar pajak hingga dua tahun juga akan menjadi catatan kita ke depannya. Karena ini wajib untuk itu harus segera menjadi perhatian desa untuk melunasi semua pajak DDnya setiap tahunnya. Dan ini pasti akan kita tindak lanjut nanti di tahun 2021," pungkask Kepala Inspektorat Kaur. (cik)



SOSIALISASI: Nampak petugas gabungan saat melakukan sosialisasi agar masyarakat Kaur selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas Gencarkan Sosialisasi 3 M

KOTA BINTUHAN - Meningkatnya kasus gejala dan positif Covid-19 hingga saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Kaur. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona semakin meluas, tim gabungan atau Satgas Covid-19 Kabupaten Kaur kembali melakukan sosialisasi 3 M. Untuk mengingatkan kembali warga Kaur supaya keluar rumah tetap dengan protokol kesehatan.

Kepala BPBD Kaur Ujang Saferi dengan tegas akan kembali melakukan kegiatan patroli dan razia penggunaan masker di Kaur. Tidak hanya itu saja tim gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinkes dan BPBD Kaur yang terhenti melakukan sosialisasi saat pilkada akan diaktifkan kembali. Dengan harapan nantinya bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah.

"Kita akan aktifkan kembali untuk melakukan sosialisasi dan ini sudah kita mulai kembali karena melihat perkembangan dari kasus Covid-19 di Kaur saat ini. Untuk itu kita akan kembali melakukan teguran terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sementara untuk tindakan nampaknya

belum, namun kita berharap ini bisa membuat masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk menghindari Covid-19," kata Ujang Saferi.

Sementara itu kemarin (17/12), tim gabungan nampak mulai kembali melakukan sosialisasi dan teguran kepada warga yang keluar rumah tidak menggunakan protokol kesehatan. Dari beberapa titik sosialisasi terkait peraturan bupati tentang protokol kesehatan seperti pakai masker, penerapan disiplin dan penegakan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Termasuk juga memberikan imbauan dan juga menerangkan maklumat pilkada akan diaktifkan kembali. Dengan harapan nantinya bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah dan di tempat-tempat keramaian. Untuk itu Satgas Covid-19 meminta semua pihak di Kaur saat ini juga kembali untuk mensosialisasikan pentingnya 3 M. Yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan mengatur jarak di tempat keramaian. (cik)

Kejari Kaur Musnahkan Barang Bukti Pidana

KOTA BINTUHAN - Jelang akhir tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur kembali memusnahkan barang bukti (BB) beberapa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. BB yang dimusnahkan di halaman Kejari Kaur kemarin (17/12) terdiri dari dua BB perkara narkoba dan 8 Perkara tindak pidana umum (Pidum). Pemusnahan BB tersebut dilakukan langsung oleh Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH dan sejumlah pejabat utama Kejari Kaur.

"Semua BB yang kita Musnahkan hari ini (kemarin red) adalah BB hasil 10 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. BB yang selama ini jadi bukti dari pihak kepolisian kemudian dalam



MUSNAHKAN: Kajari Kaur saat memusnahkan BB dari 10 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

persidangan setelah ada putusan pengadilan kita musnahkan. Dan BB ini semuanya dari perkara yang kita tangani pada tahun 2020 ini saja," kata Kajari Kaur Nurhadi

Puspandoyo melalui Kasi BB Ekke Widoto Khobar, SH.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan sabu-sabu dari dua perkara narkoba sebanyak 0,05 dan

0,07 gram. Kemudian ada juga dua alat isap bong yang juga menjadi BB dalam dua kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Kaur selama ini. Kemudian ada juga BB 8 kasus Pidum yang dimusnahkan. Seperti kasus, beberapa lembar pakaian dalam kasus pemerkosaan dan pencabulan. Kemudian ada juga kayu dan Beberapa senjata tajam dalam perkara pencurian dan pengeroyokan.

BB yang dimusnahkan dalam perkara pidum kemarin terdiri dari tiga kasus cabul yang terjadi pada bulan Juli, September dan November tahun 2020. Kemudian ada dua perkara kasus penganiayaan dan satu perkara pengeroyokan. Dan dua perkara kasus pencurian yang terjadi pada bulan September dan November 2020. Dari berbagai BB yang dimusnahkan tersebut paling banyak adalah BB kasus cabul, kemudian kasus pencurian dan narkoba. "Ini pemusnahan BB yang kedua kita lakukan pada tahun 2020. Sebelum pada bulan Oktober 2020 kita juga sudah memusnahkan BB dari perkara narkoba dan Pidum sebanyak 9 perkara," pungkask Kasi BB Kejari Kaur.

Dari pantauan RB, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di tempat yang sudah disediakan oleh pihak Kejari Kaur. Sementara untuk benda tajam dan besi dimusnahkan dengan cara dipotong. Pemusnahan BB kali ini tidak seperti sebelumnya karena harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga peserta dan tamu dalam pemusnahan BB terbatas hanya di internal Kejari Kaur saja. (cik)

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA
 Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
 Distributor Resmi Pelumas Pertamina
 Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
 Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
 Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOUR ENGINE
 PERTAMINA PELUMAS

SINAR HARAPAN ROOF
 GENTENG METAL ZINCALUME
 Ready STOK
 2 susun..?
 6 susun..?
 20 susun..?
 Tidak Masalah...!!!
 Menyediakan Truss / Rangka Baja Ringan

* Kualitas Terbaik Dan Terjangkau
 * Ringan Dan Mudah Mengikuti Protokol Asap
 * Anti Gempa Dan Angin Kencang
 * Jarak Reng Bisa di Atur Sesuai Dengan Keinginan Anda
 Sehingga Anda Dapat Menghemat Reng

Hubungi SINAR HARAPAN
 Jl. Kiriabatu No. 87, Kebun Tebing - Bengkulu
 Phone (0736) - 21663, Hr. 0822 7838 6870

Dituntut 15 Bulan, Eks Kadis Pertanian Ajukan Pembelaan

PH: Tidak Ada KN dalam Sewa Alat Berat

BENGKULU - Mantan Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, Heri Prasetyo dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Setiawan, SH, pidana 1 tahun 3 bulan (15 bulan, red) penjara. Juga kewajiban membayar denda Rp 50 juta subsidair (diganti) 6 bulan penjara bila denda tak dibayar. Tuntutan disampaikan JPU di hadapan majelis hakim diketuai Reza Fauzi, SH, CH di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (17/12) terkait perkara korupsi (penyalahgunaan) alat berat milik negara.

Dalam tuntutan, JPU menyatakan tindakan terdakwa menyalahgunakan alat berat yang dipinjamkan TPHP Provinsi Bengkulu, mengakibatkan kerugian negara (KN). Setelah pembacaan tuntutan majelis hakim menutup persidangan dan akan dibuka kembali pada Senin (21/12) dengan agenda pleidoi atau pembelaan yang akan diajukan terdakwa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Penasihat Hukum (PH) terdakwa Erwin Sagitarius, SH, MH menegaskan akan menanggapi dengan menyampaikan pleidoi pada persidangan berikutnya. "Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa ini akan kita jelaskan dalam nota pembelaan (pleidoi)," ujarnya ditemui RB usai persidangan.

Lebih jauh Erwin menjelaskan bahwa

dakwaan jaksa tentang penyalahgunaan alat berat yang merupakan aset negara, kuranglah tepat. Penggunaan aset negara di kalangan pejabat, lanjut Erwin merupakan hal biasa.

Dia mencotohkan penggunaan mobil dinas untuk mengangkut barang pejabat yang pindah tugas. "Itu sudah biasa. Malah untuk alat berat ini ada aturan yang memperbolehkan disewakan asal tidak dikomersilkan. Nah klien kita ini menggunakan alat berat untuk membantu petani mencetak sawah. Pinjaman tidak komersil, karena sewa alat berat digunakan untuk operasional berupa pembelian BBM, oil dan spare part alat berat. Karena tak ada biaya operasional yang dialokasikan untuk membantu petani tersebut," jelasnya.

Masih menurut Erwin, terdakwa memang ini ada sedikit menggunakan alat berat tersebut untuk membantu pembuatan jalan desa. Juga ada pihak ketiga di situ yang menggunakan dan ada sedikit biaya sewa. "Tetapi biaya sewa dari pihak ketiga belum pernah dibayarkan. Artinya secara materil tidak ada kerugian negara di situ," sampainya.

Sementara itu, JPU Kejari Mukomuko, Andi Setiawan mengatakan hasil kesepakatan kerugian negara Rp 83 juta telah dikembalikan oleh terdakwa. Dari situ JPU sepakat menuntut terdakwa pidana terbilang ringan, yakni 1 tahun 3 bulan penjara. Serta denda Rp 50 juta. "Mengembalikan KN itu meringankan tuntutan kita ke terdakwa.

Sedangkan pertimbangan yang memberatkan terdakwa, karena tidak menjalankan program pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Menanggapi apa yang disampaikan PH soal uang sewa alat berat yang belum dibayar pihak ketiga, Andi kembali

menegaskan bahwa fakta persidangan terungkap bahwa alat berat tak hanya disewakan ke pihak ketiga bukan satu kegiatan saja. Tetapi ada lima kegiatan. Mulai dari kegiatan proyek dinas hingga kegiatan di kuari (galian C). "Fakta persidangan memang sebagian sudah ada dibayarkan dan ada yang belum. Pencairan setelah kegiatan atau pekerjaan selesai," ujarnya.

Seperti dalam dakwaan, pada bulan Maret 2019 terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Pertanian Mukomuko melakukan peninjauan lokasi perluasan pertanian di Desa Talang baru. Dan di Desa Talang Arah Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Talang Arah melalui surat nomor SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 yang tidak ditanda tangani yang bersangkutan. Juga surat Kades Talang Baru nomor 72/SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh bersangkutan, ditunjukkan kepada Dinas Pertanian Mukomuko. Permohonan terkait pinjam alat berat untuk perluasan area.

Menindaklanjuti permohonan Kepala Desa Talang Arah dan Talang Baru tersebut, terdakwa mengajukan permohonan bantuan pinjam pakai alsintan berupa Excavator kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu untuk mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan. Surat nomor 520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 Maret 2019. Akan tetapi surat tersebut belum dilengkapi rencana kerja alat yang berisi jenis pekerjaan, volume dan waktu pelaksanaan.

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan terdakwa secara melawan hukum mengkomersilkan dengan cara menyewakan barang milik negara yang didalam penguasaannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (wij)



DITAHAN: Dua dari lima tersangka narkotika tangkapan Ditres Narkoba Polda Bengkulu. Juga tampak barang bukti satu paket ganja.

Polda Penjarakan 5 Tsk Narkotika

Barang Bukti Ganja dan Sabu 6 Paket

BENGKULU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu berhasil membekuk lima orang tersangka kepemilikan narkotika, di tempat dan waktu berbeda. Pertama, Selasa (15/12) malam, diamankan dua orang, SH (36) warga Jalan Beringin RT 06 Kelurahan Padang Jati dan AS (35) warga Jalan Halmahera RT Kelurahan Surabaya.

Bersama keduanya ditemukan satu paket sabu, 1 paket ganja dan dua linting ganja siap pakai. Menyusul tiga orang lainnya, dibekuk pada Rabu (16/12) malam di Kelurahan



SUDARNO

Sukamerindu. Yaitu SB (46), RN (24), MA (24) ketiganya warga Kota Bengkulu.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos. MH, mengatakan pengungkapan ini tak lepas dari informasi masyarakat. Penangkapan pertama di TKP Jalan Beringin RT 06 Kelurahan Padang Jati. Selanjutnya pada waktu dan tempat yang berbeda Subdit 1 Ditres Narkoba berhasil mengamankan SB, RN dan MA. Serta mengamankan satu paket sabu yang dibungkus plastik bening, 5 paket narkotika jenis ganja berbungkus kertas putih, dan 1 linting ganja siap isap. "Untuk lima orang ini dilakukan penahanan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan," pungkasnya.(wij)

Korupsi, Eks Kades Divonis 1 Tahun

BENGKULU - Majelis hakim diketuai Riza Fauzi, SH, CN menjatuhkan vonis bersalah kepada eks Kades Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Mukomuko, Bambang Hirmanto pidana 1 tahun penjara. Serta denda Rp 50 juta dan kewajiban mengembalikan sisa kerugian negara Rp 47 juta subsidair 6 bulan penjara.

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Ini disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan kemarin (17/12) di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum, yang mengganjar terdakwa 1 tahun 4 bulan penjara.

Dalam putusan majelis hakim, hal memberatkan terdakwa karena tidak menjalankan program pemerintah dan merugikan negara. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa telah mengembalikan separuh kerugian negara dan kooperatif.

Penasihat Hukum terdakwa, Dedi Kosuma, SH menyatakan pihaknya menghormati keputusan hakim. "Untuk upaya hukum lanjutan kita masih pikir-pikir. Kita konsultasikan dengan klien dulu," sampai Dedi kepada RB. Sementara JPU Kejaksaan

Negeri Mukomuko, Andi Setiawan, SH mengatakan untuk kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Rp 47 juta lebih. Sedangkan kerugian negara ada Rp 95 juta, maka terdakwa dalam putusan majelis hakim harus membayar kerugian negara Rp 47 juta lebih. "Kalau terdakwa tidak membayar sisa kerugian negara, maka disubsidair 6 bulan penjara," ujarnya.

Terkait putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan, Andi mengatakan akan konsultasi dengan Kajari Mukomuko apakah menerima putusan atau akan melakukan banding.(wij)

PENGADAAN
Pusat Janda Perkotaan (PJP), Pijinan (Pipin), Pijinan POC, Bango Beringin

Jln. Lintas Bengkulu - Mense PMS Rd. Babaton Kc. Subaraja Kota. Seluma. Tlp/WA 08222839393

YAMAHA **Thamrin**

#GENERASI 125 MENANG BANYAK

MIS 125 ME KONTRAKSI, FreeGo THE AMAZING MATIC, Fino 125, LAIDE 125

yamaha.thamrin.bengkulu

JOIN US NOW!!! **Nusa Tour & Travel** **TURKISH AIRLINES**

Turkey Explore 100.000

Rp. 13.800.000

Depotkan Diric Khusus Dan Souvenir Cendek Untuk Yang DP 1d 17 Agustus 2020 !!!

GRAND MASJID SAFER MOSQUE & TOWER - SULTAN MASJID - ELEPHANT MARCH CITY - TURKISH LEARNER CENTER - COTTOW CASTLE - BIRKAWAN BISTRO - GERMAN UNDERGROUND CITY - BIRANGS POTERY VILLAGE - SALT LAKE - ARAB MUSEUM - CAMBUCHE - BOSPHORUS CRUISE - GRAND BAZAAR - HAGIA SOPHIA - TOPKAPI PALACE

12-21 Oct 2020, 09-18 Nov 2020, 23 Nov - 02 Des 2020

24 Nov 2020 (Khusus Grup Nusatour)

Contact Person : 0812 9296 976 (Rose), 0813 7783 8875 (Venny)

INFO KULINER BENGKULU

- FORTUNA CAFÉ DAN RESTO**
Alamat: Jl. Rafflesia Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Reservasi: HP. 0813-9841-5974
- SOTO #CAKKHAFI**
Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511
- SAMBEL MERCON 3**
Alamat: Simpang Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu
- KEDAI KOPI GADING CEMPAKA**
Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511
- Reunion Resto**
Alamat: Jalan Pariwisata Pantan Panjang Kota Bengkulu Reservasi Hub : HP. 085366962224
- Bakso O' Boss**
Jl. Raya Rafflesia No.42 Nusa Indah - Kec. Ratu Agung - Kota Bengkulu
- dailycious all things delicious**
Alamat: Jln. Merapi Raya No.107 Kebun Tebang - Kota Bengkulu HP. 082333338251
- KING BAKSO**
RAJANYA BAKSO
Alamat: Jln. Soeprato No.92 Kebun Geran - Kota Bengkulu
- Syarah BAKERY**
Alamat: Jln. Mahakam 4 Lingsar Barat No.15 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 081367285252
- Kemping Wisata Mawar Bengkulu**
LIVE MUSIC
BUKA MULAI PUKUL 10.00 WIB S/D 22.00 WIB
Alamat: Jln. Jenggala 1 Ujung Kel. Lingsar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 082374702196 / 081273487999
- Dapur Senandung**
OPEN NEW NORMAL
Jl. ADAM MALIK (SAMPING BENGKEL BLEBONG) PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
- Ruang Promosi Kuliner**
- Ruang Promosi Kuliner**



SUZUKI **GEMERLAP SUZUKI**

DP Mulai **20Jtan*** **ALL NEW ERTIGA** DP Mulai **20Jtan*** **NEW IGNIS** DP Mulai **15Jtan*** **NEW CARRY** DP Mulai **12Jtan***

Hadiah Langsung **Emas LM 2 s.d 10g*** **Gratis Olie - Sparepart s.d 50.000km***

PT. KANGAROO MOTOR MANDIRI

Head Office : Jl. Mayjend Sutuyo No. 88 Kota Bengkulu. Telp : (0736) 28888/ 085 2222 11 767

Outlet Penarik : Jl. Lintas Bengkulu Padang De Sidodadi Penarik. Telp. 0852-6835-8886

Outlet Curup : Jl. Durian Depan (Simpang Merigi) Kab. Kepahiang. Telp. 0821-7595-8529

Outlet Manna : Jl. Ahmad Yani Kec. Ibu Kota Manna. Telp. 0821-2314-9543

Jam Kerja Bengkelt : Senin - Jumat : 08.30wib - 18.30 WIB Sabtu : 08.30wib - 12.30 WIB

Hotline Service : 0821-7573-6233

CV. CENTRAL ELEKTRO

JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU

0736 7324 996 central_elektro.bki

0811 7360 422 centralelektobengkulu.com

- PENGADAAN AC **HIKVISION**
- PENJUALAN AC
- SERVICE AC
- SPARE PART AC
- RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
- CCTV & SECURITY SYSTEM

DAIKIN

Teras



RESMIKAN: Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA meresmikan Taman Belajar Techno Park dan ruang kelas baru SMK Agribisnis Dangau Datuk.

Eksplorasi Kemampuan Diri

BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA meresmikan Taman Belajar Techno Park dan ruang kelas baru SMK Agribisnis Dangau Datuk yang berlokasi di Jalan Lintas Air Sebakul Kecamatan Selebar, Kamis (17/12).

Gubernur Rohidin mengapresiasi pusat kegiatan belajar yang didirikan oleh mantan Bupati Kabupaten Kaur Hermen Malik ini. Menurutnya model pendidikan seperti ini merupakan wadah belajar yang sesungguhnya. Sebutan taman membuat anak-anak nyaman dan mampu mengeksplorasi kemampuan diri.

Dengan model pendidikan seperti ini ilmu yang didapat siswa bisa langsung dipraktikkan sehingga diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

☞ Baca **EKSPLORASI**.. Hal 15

Lintas Online

Sudah Sebar Undangan, Boleh Pesta Pernikahan

BENGKULU - Walikota Bengkulu secara resmi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 338/28/B. Kesbangpol tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan yang mulai diberlakukan pada tanggal 21 Desember mendatang. Namun menyikapi hal tersebut bagi warga Kota Bengkulu yang akan menggelar pesta pernikahan dan telah menyebarkan undangan sebelum keluarnya SE tersebut, masih diberikan keringanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pesta yang digelar wajib menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi ketika diwawancarai awak media mengatakan, Surat Edaran dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu menindaklanjuti terkait meningkatkannya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bengkulu dan kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan Protokol Kesehatan. (**)



LANTIK: Wakil Walikota, Dedy Wahyudi, SE, MM memimpin pelantikan 8 pejabat eselon II, kemarin. Tampak pejabat yang dilantik menandatangani berkas sumpah jabatan.

Dituntut Bikin Terobosan Tapi Minim Anggaran

BENGKULU - Setelah melalui proses tahapan yang cukup panjang, kemarin (17/12) 8 pejabat eselon II pemenang seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkot Bengkulu resmi dilantik. Walikota Bengkulu Helmi Hasan melalui

Wakil walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi berpesan agar kedelapan pejabat ini, dapat memegang teguh tiga sikap, untuk mendukung semua program-program pemerintah dan melaksanakan perintah pimpinan. "Kami betul-betul berharap untuk

loyalitas, integritas, dan kapasitas. Tunjukkan loyalitas, aplikasi Integritas, dan wujudkan dengan kapasitas," kata Dedy, kemarin.

Dikatakannya, agar para pejabat yang baru dilantik ini bisa memanfaatkan kapasitas yang dimiliki. Juga,

harus total dalam bekerja. Mengingat di Pemkot Bengkulu dituntut kerja cepat, selalu ingin ada inovasi dan terobosan. Ia pun berharap agar masing-masing yang dilantik itu memiliki inovasi dan dapat mengukir prestasi.

☞ Baca **DITUNTUT**.. Hal 15



DISKUSI: Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko bersama Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA beserta undangan saat diskusi bersama.

Tujuh Kelurahan Rawan Narkoba

Kepala BNN Kunjungi Bengkulu

BENGKULU - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol Drs. Toga H Panjaitan menjelaskan, terdapat 7 kelurahan di Kota Bengkulu yang termasuk dalam kawasan rawan dan rentan akan Narkoba.

"Keberadaan kawasan rawan

dan rentan narkoba di tujuh kelurahan tersebut, mengindikasikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup massif," katanya dalam kegiatan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pelaksanaan Tim Asmesmen Terpadu (TAT) terhadap pengguna narkotika yang bermasalah hukum di masa pandemi.

Kegiatan yang digelar kemarin (17/12) itu, dihadiri langsung Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko, juga Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA. Dilanjutkan Toga, BNN Provinsi Bengkulu telah melakukan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada 123 orang klien, 19 orang klien TAT dan 40 orang klien pascarehabilitasi.

☞ Baca **TUJUH**.. Hal 15

Sistem Kerja WFH ASN Masih Dikaji

BENGKULU -Meningkatnya kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu membuat Pemrov Bengkulu harus mengkaji kembali kebijakan *Work From Home* (WFH) atau kerja dari rumah. Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, WFH bisa dilakukan sepanjang tidak mengganggu kinerja.

"Oh belum, kita akan kaji besok pagi (hari ini, red). Kita kaji kembali, tapi saya kira sepanjang tidak mengganggu kinerja di kantor saya kira bisa WFH," jawab Rohidin saat ditanya kebijakan WFH ASN di perkantoran lingkungan Pemrov Bengkulu.

Sedangkan untuk pembatasan pertemuan-pertemuan skala besar, terang Rohidin, juga masih akan dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang rencananya akan dilaksanakan hari ini. Pertemuan pembahasan bersama forkopimda ini perlu dilakukan mengingat hal ini merupakan kesepakatan daerah yang akan diputuskan bersama.

"Setelah langkah-langkah upaya penanganan kita pustakan kemarin, seperti yang sudah kita sampaikan termasuk perubahan RS darurat, peningkatan ruang isolasi dan lain-lain ada 6 langkah untuk pembatasan pertemuan-pertemuan skala besar itu akan kita sepakati besok pagi (hari ini, red)," papar Rohidin.

☞ Baca **SISTEM**.. Hal 15

ASTRA MOTOR

KHUSUS MATIC

GRATIS

Hanya **Rp. 99.000,-***) **PAKET - A** **11 POINT**

Hanya **Rp. 65.000,-***) **PAKET - B** **7 POINT**

GEBYAR GANTI OLI DI AHASS

- ~ GRATIS OLI GEAR
- ~ GRATIS KONSULTASI TEKNIK
- ~ JAMINAN OLI ASLI
- ~ KEPASTIAN HARGA

Promo ini berlaku di AHASS wilayah Bengkulu

HONDA **care**

MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?

HUBUNGI LAYANAN care **0819 2500 989** **ATAU 1 500 989**

LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI: **MOTORKU**

DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERRAL CODE: **HNBKBL**

Tujuh Kelurahan Rawan ...

Sambungan dari hal 9

Kemudian sepanjang tahun 2020, BNN Provinsi juga berhasil menangkap 8 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan 26 tersangka dengan jumlah barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3.097 gram dan ganja sebanyak 61.400 gram.

"Untuk Pasien Rehabilitas saat ini kondisinya tetap mejalankan proses sehingga belum kita temukan pasien yang terpapar Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko mengatakan, pertemuan tersebut membahas tentang implementasi APS. "Yang jelas kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang efektif dari Lapas untuk memproses napi-napi yang bermasalah agar dapat di proses. Setiap melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, kita harus segera bisa menentukan status dari pelaku. Apakah pelaku sebagai pemakai, pengedar atau sebagai bandar," urainya.

Menurutnya, kalau pelaku sebagai pemakai lanjutnya, harus segera dilakukan assesment

guna menentukan langkah selanjutnya terkait rehabilitasi. "Pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba ini, untuk membentuk SDM unggul tanpa Narkoba," tegasnya.

Sementara Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah juga menyambut baik kedatangan Kepala BNN RI. Ia mengatakan, penanganan terhadap narkoba harus lebih terkonsep dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan berbagai unsur masyarakat. Selain memperketat penegakan hukum, upaya pencegahan juga harus dilakukan secara sinergi mulai dari lingkungan potensial hingga yang tak terdeteksi potensial.

"Penanganan rehab perlu disinergikan, saya mengusulkan agar RSKJ Soeprapto Bengkulu bisa diusulnkan agar dipisahkan, lalu menjadi tempat rehabilitasi tempat narkoba dan pengolahannya akan dialihkan kepada Kementerian Kesehatan dan bisa menjadi rujukan masyarakat bagian selatan," harapnya.

Gubernur berharap ke depan, Provinsi Bengkulu bisa menjadi wilayah yang bersih dari narkoba. Dengan membangun sistem pencegahan yang berkesinambungan disekolah-sekolah. (hkm)

Sambungan dari hal 9

"Di tengah pandemi ini kita dituntut untuk melakukan terobosan di tengah keuangan yang sangat minim. Tunjukkan bahwa pimpinan tidak salah pilih," tambahnya.

Untuk diketahui, usai dilantik para pejabat ini juga diambil sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh rohaniwan.

Di sisi lain, salah satu pejabat yang dilantik, Eko Agusrianto menuturkan bahwa salah satu yang ditekankan oleh pimpinan. Dalam hal ini, khususnya

8 PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK

1. Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu dijabat oleh Nofrisman, ST, M.Si
2. Kepala Inspektorat Kota Bengkulu dijabat oleh Ir. Eka Rika Rino, MM
3. Kepala Bapelitbang dijabat H. Pirman Romzi, S.Sos, M.Si
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dijabat Muklis S.Sos
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dijabat I Made Ardana, ST, MT
6. Kepala Dinas Pariwisata dijabat Amrullah, SP.
7. Kepala Dinas Kominfosan dijabat Drs. Eko Agustianto M.Si
8. Kepala Satpol-PP dijabat oleh Drs. Yurizal.

kepada Dinas Kominfosan adalah membangun inovasi.

"Kemudian yang ditekankan pula yakni mengenai tugas dan fungsi kita di Dinas

Kominfosan dalam penyebarluasan informasi. Karena inilah yang menjadi salah satu tolak ukur suksesnya program pemerintah," sampainya. (war)

Bersihkan Hati dari Sifat Kikir



Oleh: Drs. H. Mahasurman, MHI.

BENGKULU - Sifat kikir adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menumpuk harta dengan cara tidak diinfakkan atau dibagi dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat kikir akan rela mengorbankan dirinya demi harta dan dia sendiri tidak mau mengorbankan hartanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan orang lain.

Oleh karena itu, sifat kikir ini sangat berpotensi membahayakan kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan individual tapi juga kehidupan sosial dan masyarakat. Jika sifat kikir sudah meluas dalam kehidupan individu dan masyarakat, maka banyak kekacauan yang akan muncul. Hal ini karena seseorang yang dikuasai sifat kikir ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta meski dengan cara yang amoral dan di sisi lain ia tidak akan peduli dengan kehidupan dan penderitaan orang lain.

Setidaknya ada tiga bahaya besar yang akan timbul bila sifat kikir ini menguasai kehidupan seseorang dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abdullah bin Amr. "Jauhkanlah diri kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu talah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kikir mendorong mereka berbuat zalim, lalu zalimlah mereka. Mendorong mereka memutuskan silaturahmi, lalu mereka pun memutuskan. Mendorong mereka untuk berbuat jahat, lalu berbuat jahatlah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya satu kezaliman membawa banyak kegelapan di hari kiamat. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan buruk dan tindakan yang buruk,"

Pertama, sifat kikir akan melahirkan kezaliman, baik kezaliman terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Di antara bentuk kezaliman yang timbul dari sifat kikir adalah seperti tidak peduli mencuri harta orang lain, korupsi dan lainnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat Abu Hayyaj Al-Asadi thawaf di Baitullah. Kemudian dia melihat seseorang berdoa, 'Allahumma qini syuhha nafsi (Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir)'. Orang itu tidak menambah dari itu. Lantas Abu Hayyaj bertanya kenapa hanya berdoa demikian. Orang itu menjawab, "Sesungguhnya jika diriku terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan perbuatan dosa lainnya."

Kedua, sifat kikir akan menyebabkan tali silaturahmi terputus dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat kikir, ia tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Ia hanya mementingkan hartanya saja dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena itu, tali silaturahmi menjadi terputus dan kemudian digantikan dengan timbulnya kecurigaan, iri hati dan dengki, kebencian dan pudarnya saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ketiga, sifat kikir melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan adalah sifat kikir.

Seseorang yang dikuasai sifat kikir sudah tidak mau mengikuti perintah tentang anjuran untuk berbagi antar sesama. Ia juga tidak akan percaya jaminan Allah terkait rezeki. Ia hanya percaya pada harta benda yang dimilikinya. Jika harta yang dimiliki tidak dibagi dengan orang lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Karena itu, Nabi SAW bersabda, "Sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya." (HR. Ahmad).

Semoga bermanfaat dan kita terhindar dari sifat kikir yang tanpa kita sadari akan menghancurkan kehidupan kita. Baik kehidupan didunia lebih lebih kehidupan di akhirat. (iks)

Sistem Kerja WFH ASN Masih ...

Sambungan dari hal 9

Menurut Rohidin, setiap daerah tidak dapat disamakan terkait kebijakan yang akan diambil mengenai pembatasan pertemuan skala besar karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota.

"Tentu nanti akan ada kekhususan disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota karena kita tidak juga bisa menyeragamkan semua 9 kabupaten dan 1 kota karena situasi berbeda," tukas Rohidin.

Sebelumnya, dari rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Ada 6 langkah yang dihasilkan dari hasil rapat evaluasi dalam rangka penanganan kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Meliputi, menetapkan 4 Rumah Sakit (RS) darurat penanganan Covid-19, yaitu Bapelkes Bengkulu, Wisma Atlet Bengkulu Utara, Rusunawa Bengkulu Selatan, dan balai di Rejang Lebong.

Keempat lokasi ini mewakili wilayah selain infrastruktur yang memang sudah tersedia. Langkah lainnya meminta seluruh rumah sakit di kabupaten/kota mengupgrade agar

memodifikasi memiliki ruang isolasi yang baik. Kemudian menyiapkan tes PCR dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium di masing-masing kabupaten/kota. Agar tidak terjadi penumpukan sampel tes yang diambil. Serta merekrut tenaga kesehatan untuk pendampingan perawatan bagi pasien kasus Covid-19.

"Terkait upaya pencegahan, kepatuhan kita pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu harus betul-betul ketat. Harus kembali kita advokasi betul masyarakat kita," tukas Rohidin.

Ditambahkan Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri, saat ini Pemprov memang belum mengeluarkan kebijakan WFH 100 persen di seluruh perkantoran. Akan tetapi bagi OPD yang menjamin masih dapat bekerja dengan kondusif di rumah, dan tidak mempengaruhi pekerjaan di kantor maka bisa saja mengusulkan untuk melakukan WFH.

"Saat ini kita memang belum 100 persen WFH, tapi sudah ada OPD yang WFH hanya saja itu pun tetap masuk kerja secara bergantian," demikian Hamka. (key)

Eksplorasi ...

Sambungan dari hal 9

"Kita apresiasi, bisa jadi ini akan menjadi model. Diknassaya minta berikan suport agar nanti bisa menjadi benchmark pembeding bagi lembaga pendidikan lain," ujarnya.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta melepas ayam kalkun dan kelinci sebagai tanda dibukanya taman belajar yang terbuka bagi lembaga pendidikan lainnya. Selain taman di kawasan seluas 7 hektar ini juga terdapat beberapa bangunan yang disebut Dangau, tempat praktek siswa SMK Agribisnis mengolah produk menjadi barang jadi.

Diantaranya Dangau Industri, Dangau Jamur, Dangau Boga, Dangau Kriya dan Dangau Busana. Hasil praktek siswa saat ini telah dipasarkan secara online dan melalui kios oleh-oleh. Dijelaskan pendiri taman belajar Dangau Datuk, Hermen Malik konsep pendidikan di SMK Agribisnis ini melibatkan seluruh panca indra.

Apabila di sekolah umumnya para siswa hanya mendengar penjelasan di kelas, di sini para siswa langsung mempraktekan pelajaran sehingga bukan hanya tau teori namun juga paham penerapan ilmunya. Dirinya juga mengundang sekolah lain dari tingkat PAUD hingga Menengah Atas untuk memanfaatkan Taman Belajar Dangau Datuk bersama-sama.

"Kita mau mendirikan sekolah yang modelnya langsung ke terapan langsung mengerjakan tidak hanya berteorit," pungkas Hermen. (key/rhs)

Pantai Barat Bengkulu Rawan Risiko Tsunami

BENGKULU - Kepala Balai Wilayah II Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Hendro Nugroho mengatakan wilayah Pantai Barat Bengkulu memiliki risiko bencana tsunami yang tinggi karena wilayahnya yang berhadapan langsung dengan sumber gempa megathrust di Samudra Hindia.

Hal itu dikatakannya dalam acara Workshop Penguatan Sub Sistem Pendukung Peringatan Dini Tsunami yang digelar BMKG di Mercure Bengkulu. Ditambahkannya, sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana, BMKG selalu siap memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang cepat dan akurat.

"Peringatan dini tsunami yang disebarluaskan oleh BMKG akan diterima oleh pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui beragam



SAMPAIKAN: Narasumber saat menyampaikan materi Workshop tentang Penguatan Sub Sistem Pendukung Peringatan Dini Tsunami.

empat kelurahan di Kota Bengkulu yakni Kelurahan WRS mobile dan Info BMKG, SMS, Email, Fax, Website, dan Media Sosial," katanya.

Sementara itu, dalam kegiatan workshop kemarin, pesertanya terdiri dari perwakilan masyarakat dari

Bengkulu dan lainnya.

Dijelaskan Hendro, tujuan kegiatan workshop ini adalah agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemahaman tentang pentingnya respon peringatan dini tsunami dari BMKG. Serta memahami konsep evaluasi mandiri dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sistem mitigasi tsunami di daerahnya dengan secara langsung terlibat dalam penyusunan rencana evaluasi dan penyusunan prosedur tetap dalam merespon peringatan dini tsunami.

"Selain itu, dalam kegiatan ini akan dibentuk Tim Siaga Bencana di Kelurahan-Penurunan, Kelurahan Lempuing, anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang mampu dan aktif sebagai penggerak dalam penanggulangan bencana tsunami di daerahnya," jelasnya kepada RB. (iks)

Gebyar Promo Fresh Akhir Tahun

ini, yang akan dimulai dari hari ini (18/12) hingga Senin (21/12). Hypermart masih selalu setia menemani langkah berbelanja pelanggan setia dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lainnya.

Manager Hypermart Bencoolen Mall, Lukman Hamli

mengatakan adapun item fresh yang kami tawarkan di minggu ini adalah Anggur Red globe harga Rp 3.850/100gr, Apel Fuji Super Rp 3.490/100 gr, Century Pear Rp 2.590/100 gr, buah naga Rp 1.590/100gr, semangka merah nonbiji Rp

780/100gr bawang Bombay Rp. 2.550/100 gram. "Untuk kebutuhan dagingnya kami tawarkan daging kerbau Rp. 9.490/100 gram," jelasnya kepada RB.

Lalu ada juga ayam broiler Rp 30.900/pcs, ikan salmon Rp. 24.590/100 gr, dan aneka bakso seafood Rp 7.490/100 gram. "Selain item tersebut kami masih memberikan produk buah lokal punya kita sendiri, yaitu buah khas Bengkulu yaitu Jeruk Gerah Lebong. Dimana buah yang banyak mengandung vitamin C ini kami banderol hanya dengan harga Rp 1.990/100 gram," promonya.

Buah mangga jenis mangga gedong gincu ditawarkan hanya dengan harga 3.490/100 gram. "Tentunya masih banyak lagi promo-promo menarik lainnya, mari kunjungi kami dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama hypermart kebutuhan anda akan terpenuhi," ungkap Lukman. (iks)

LAYANAN SMS PDAM KOTA BENGKULU

Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.

Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.

UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke **0821 8613 4569** sbb:

a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan

Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Orlana, SE, M.Si
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Harga

KOMODITI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1. BERAS	-IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000
	-IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000
	-Manggis Manis (Prensium)	kg	12.500
	-Kembang Koli (Prensium)	kg	11.500
	-Temurah	kg	9.375
	-Cag Buloir/ Dilog	kg	9.375
	-DN	kg	12.500
2. GULA PASIR	-Bimoli Kerasan	1 liter	15.000
	-Tangsi Mark	1 liter	12.500
3. MINYAK Goreng	-Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000
4. DAGING	-Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000
	-Sanding Larmer	kg	60.000
	-Telaten	kg	60.000
	-Has Luar	kg	120.000
	-Has Dalam	kg	120.000
	-Daging Ayam Broiler	kg	34.000
	-Daging Ayam Kampung	kg	65.000
5. TELUR	-Telur Ayam Broiler	kg	25.000
	-Telur Ayam Kampung	kg	32.000
6. Cabe Merah Keriting	-Cabe Rawit Hijau	kg	42.000
7. Bawang	-Merah	kg	25.000
	-Putih	kg	26.000
8. Susu Kental Manis	-Bendera	370 gr	11.000
9. Garam	-Indonesi	kg	13.000
10. Kacang	-Kedelai Eks Impor	kg	8.600
	-Hijau	kg	35.000
	-Hijau	kg	23.000
12. Mie Instan	-Kari Ayam	bks	3.000
13. Ikan	-Ain Teri	kg	35.000
	-Kembung	kg	25.000
	-Segar Tongkol/ Tuna	kg	4.000
14. Ketela Pohon		kg	7.000
15. Jagung Pipilan Kering		kg	7.000

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

KOMODITI	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1. Semen 3 Rodi	57.000	
2. Semen Holcom	57.000	
3. Semen Merah Putih	55.000	
4. Semen Padang	58.000	
5. Besi Beton 6 mm	30.000	
6. Besi Beton 8 mm	45.000	
7. Besi Beton 10 mm	60.000	
8. Besi Beton 12 mm	97.000	
9. Triplek 6 mm	95.000	
10. Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11. Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12. Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13. Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14. Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15. Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16. Paku 6 cm (3 inch)	17.000	
17. Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18. Pupuk KCL	7.000	
19. Pupuk NPK (Mutara)	10.000	
20. Pupuk SP36	2.000	
21. Pupuk Urea	7.000	
22. Pupuk ZA	1.400	
23. Gas LPG 3 KG	18.000	
24. Bata Ringan	91.000	

Sumber: Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

Jl. Pahlawan No. 13 Telp. (0736) 21503, 21751, 22144 Bengkulu
E-mail: kantorpertanahkota@ptn.go.id

PERKUMUMAN
(Tentang Sertifikat Hilang)
Nomor: HP.02.02/51/ -17.71/XII/2020

Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah, Jenis, Luas, dan Lokasi	NILAI	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	Keterangan
1	Rahmat Ali Komering Kel. Komering Kec. Merapi Sakti						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (Tiga Puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Bengkulu, 15 Desember 2020
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
ADAM HAWADI, SE

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154



H. Rosjonsyah, S.J.P, M.Si
(Bupati)



Wawan Fernandez, SH, M.Kn
(Wakil Bupati)



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Kami Mengimbuu Masyarakat
Tidak Menggelar Pesta yang Mengundang Kerumunan
Demi Mencegah Timbulnya Klaster Baru
Penyebaran Covid-19
serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan



Sekda Lebong
H. Mustarani Abidin, SH, M.Si

Ditarget Rp 40 Juta, Realisasi Rp 30 Juta

PELABAI - Tidak hanya untuk yang ditarget besar, realisasi sejumlah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget pas-pasan sekalipun tetap tidak tercapai. Salah satunya PAD dari sektor pajak retribusi parkir di tepi jalan umum. Hingga akhir Desember realisasi pajak retribusi di tiga titik jalan raya itu hanya akan terkejar Rp 30 juta dari target Rp 40 juta.

Kendalanya, sesuai klaim Bidang Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, murni akibat pandemi Covid-19. Dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong sempat mengeluarkan kebijakan membebaskan masyarakat dari enam item pajak selama 5 bulan di awal-awal pandemi Covid-19 merebak.

"Diperparah kondisi pasar yang sempat terjadi penurunan kunjungan di awal-awal Covid-19. Kalau tidak ada kebijakan gratis pajak itu, pastinya realisasi pajak parkir jauh melebihi dari angka yang ditargetkan," kata Kabid Perhubungan, Dinas PUPRHub Kabupaten Lebong, Amirudin Iskandar, SE, M.Ak.

Lebih lanjut dikatakannya, target PAD dari sektor pajak retribusi parkir itu ditetapkan berdasarkan potensi di lapangan. Mengingat hanya 3 titik yang dijadikan sasaran, tentu saja nilainya tidak bisa diharapkan besar layaknya pos pajak lainnya. Itupun dari 3 titik yang ditetapkan, 1 titik diantaranya baru dilegalkan pungutan parkirnya di tahun berjalan.

"Tadinya di awal tahun hanya di tepi jalan Pasar Muara Aman di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara dan tepi jalan Pasar Rakyat Lebong di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen yang ditetapkan sebagai pos PAD parkir. Di tengah jalan, menyusul tepi jalan Taman Smart City Karang Nio di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai ikut ditetapkan," terang Amirudin.

Dilansir sebelumnya, pembebasan enam item pajak di Kabupaten Lebong itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor 216 Tahun 2020 tentang Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mengantisipasi Ketidakstabilan Ekonomi Masyarakat Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sejak April hingga Agustus, Bidang Perhubungan mengistirahatkan juru parkir hingga akhirnya terhitung September diaktifkan kembali setelah Pemkab Lebong memutuskan mencabut SK bupati itu. (sca)

12 Desa Terancam Tidak Terima ADD

PELABAI - Dari 93 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Lebong, 12 desa diantaranya terancam tidak menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Kalaupun tetap direalisasikan, nilainya akan disunat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Itu merujuk ke laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang masuk ke Badan Keuangan Daerah (BKD) terhitung kemarin (17/12).

Dua belas desa yang tersebar di 8 kecamatan itu sama sekali tidak menyotor serupiah pun tagihan PBB-P2 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang telah dibagikan. "Walau batas waktu pelunasan telah kami tetapkan 31 Oktober,

namun kami tetap menerima setoran PBB-P2 hingga 31 Desember," ujar Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.AK.

Namun konsekuensinya, wajib pajak yang membayar lewat dari 31 Oktober juga dibebankan membayar denda. Nilainya 2 persen dari nilai tagihan PBB-P2 yang dibebankan. Jika hingga 31 Desember tidak juga dibayarkan, otomatis akan menjadi piutang karena pasti menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bocor. "Namanya piutang tetap harus ditagih sehingga tetap harus dilunasi oleh wajib pajak," ungkap Rudi.

Selain itu, 5 desa lainnya realisasinya masih sangat minim. Setorannya masih di bawah 15 persen. Bahkan 3 desa di antaranya ada yang baru

menyetorkan PBB-P2 untuk 1 orang. Yakni Desa Talang Baru 1, Desa Kota Baru Santan dan Desa Pelabuhan Talang Leak yang hanya kepala desanya yang membayar. "Untuk desa yang realisasinya masih sangat rendah, kami harap segera memaksimalkan penagihan agar tidak meninggalkan piutang besar tahun ini," tegas Rudi.

Sementara secara keseluruhan, realisasi PBB-P2 telah mencapai angka 93 persen dari 31.347 wajib pajak. Nilainya sudah mencapai Rp 1,3 miliar dari target Rp 1,4 miliar. Itu berkat realisasi hampir 50 persen desa yang menyetorkan PBB-P2 di atas 80 persen. Bahkan beberapa desa dan kelurahan telah melunasi PBB-P2 sesuai

12 Desa Nihil Realisasi PBB-P2	
Desa	Kecamatan
Bentangur	Uram Jaya
Kota Agung	Uram Jaya
Desa Talang Ratu	Rimbo Pengadang
Ketenong Jaya	Pinang Belapis
Tambang Sawah	Pinang Belapis
Air Kopras	Pinang Belapis
Sebelat Ulu	Pinang Belapis
Gunung Alam	Lebong Atas
Tik Teleu	Lebong Atas
Pelabai	Pelabai
Tabeak Kauk	Lebong Sakti
Talang Donok 1	Topos

5 Desa Setoran PBB-P2 Di Bawah 15 Persen	
Desa	Kecamatan
Talang Baru 1	Topos
Kota Baru Santan	Pelabai
Nangai Aman	Lebong Utara
Kampung Gandung	Lebong Utara
Pelabuhan Talang Leak	Bingin Kuning

SPPT dan DHKP. (sca)

Upacara HUT Lebong Diikuti Eselon III

PELABAI - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam pelaksanaan upacara bendera di Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten ke 17 yang akan digelar hari ini, pesertanya hanya melibatkan PNS eselon III. Sementara seluruh PNS eselon II yang aktif menjabat, diminta hadir sebagai tamu undangan sejajar dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

"Peserta upacara harus dibatasi demi mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah keramaian di tengah pandemi Covid-19," ujar Kabag Keprotokolan Sekretariat Kabupaten Lebong, Riki Irawan, S.Sos, M.Si.

Upacaranya dijadwalkan pukul 08.00 WIB pagi ini di halaman Kantor Bupati Lebong. Upacara peringatan

berdirinya Kabupaten Lebong itu akan dipimpin Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.I.P, M.Si selaku inspektur upacara. Sementara siangnya, pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan paripurna istimewa yang akan digelar di gedung DPRD Kabupaten Lebong.

"Seluruh peserta dan tamu undangan diwajibkan mengenakan masker serta segala bentuk standar penunjang protokol kesehatan telah kami siapkan di lokasi upacara. Salah satunya memeriksa suhu badan peserta dan tamu yang diundang hadir," terang Riki.

Perbedaan lainnya, dalam perayaan HUT kabupaten yang pertama kali digeser dari 7 Januari ke 18 Desember itu, Pemkab Lebong juga meniadakan segala bentuk kegiatan kemeriahan.



PERSIAPAN: Panitia HUT kabupaten dari Pemkab Lebong tengah menyiapkan tenda dan kursi untuk tamu undangan upacara. (ARIS/RB)

Baik yang bersifat perlombaan, bazar dan stan pameran maupun pesta rakyat. Di HUT tahun-tahun sebelumnya selalu dibuka dan ditutup dengan hiburan konser musik artis ibukota. (sca)

Dewan Komisaris, Direksi dan Segenap Karyawan/ti

bank Bengkulu

tangguh dan tumbuh

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun

KABUPATEN LEBONG

yang ke-17

18 Desember 2003-18 Desember 2020



Komisaris Utama Independen
Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE, MSc



Komisaris
H. Mulyadi Ismail, SE, MSI



Direktur Utama
H. Aguslim, SE, ME



Direktur Kepatuhan
Hj. Yanti Kurniati, SE, MM



Direktur Operasional
Joni Haryanto



Direktur Bisnis
Ikhwanul Okti, SE



KABUPATEN LEBONG
SWARANG PATANG STUMANG



GAJI GURU: Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten Mukomuko mendatangi BKD Mukomuko mempertanyakan gaji PTK yang belum dibayar.

Gaji 1.138 PTK Belum Dibayar

MUKOMUKO - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mukomuko, Rasita, S.Pd bersama pengurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan, mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, kemarin (17/12). Mereka memperjuangkan 1.138 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Mukomuko yang gajinya belum kunjung dibayarkan Pemkab Mukomuko.

Gaji 1.138 orang PTK yang belum dibayarkan mencapai tiga bulan. Terhitung Oktober - Desember 2020. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 3,4 miliar. Padahal

ribuan PTK itu bukan berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) melainkan sebagai pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK).

Rasita menyayangkan kondisi tersebut. PTK yang hanya diberikan gaji Rp 1 juta per bulan belum kunjung menerima haknya sampai 3 bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja, terutama PDPK yang berprofesi sebagai guru atau pendidik. Hasil pertemuan itu, lanjut Rasita, pihaknya belum dapat memberikan jawaban yang menggembirakan bagi 1.138 PTK. Sebab, dari BKD Mukomuko belum dapat memberi kepastian, kapan

gaji PDPK siap dibayarkan. Alasannya, Pemkab masih mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

"Belum ada kepastian dari BKD. Mengingat kondisi keuangan daerah," kata Rasita.

Ia berharap, kondisi tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Sangat disayangkan, guru dituntut meningkatkan profesionalismenya. Sementara, kesejahteraan guru terkesan dikesampingkan. Pihaknya bersyukur, Pemkab sudah memberikan perhatian lebih kepada guru-guru honorer daerah. Dengan memberikan gaji Rp 1 juta per

bulan, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dan mengangkat ribuan guru honorer daerah menjadi PDPK. Akan tetapi akan lebih sempurna jika pembayaran gaji bisa lancar, apalagi bisa dibayarkan setiap bulan.

"Guru dituntut profesional, sementara hak mereka terlambat. Kami berharap ini tidak terjadi lagi ke depannya. Dengan adanya kondisi ini, membuat PGRI juga tidak fokus. Komitmen PGRI Mukomuko fokus membantu meningkatkan profesionalisme guru. Ada kejadian seperti ini akan bisa memecah perhatian PGRI," jelas Rasita.

Rombongan PGRI Mukomuko ini diterima Sekretaris BKD Mukomuko, Kasimin, SH didampingi Kabid Perbendaharaan BKD Mukomuko, Ahmad Luthfi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekretaris BKD Mukomuko. Kasimin meminta para guru bisa bersabar. Pemkab Mukomuko selalu berupaya melayani dan memenuhi hak ribuan guru PDPK dengan maksimal.

"Mohon bersabar dan mohon dimaklumi kondisi keuangan daerah saat ini. Kita berupaya ketika sudah siap, secepatnya kami proses," terang Kasimin. (hue)

Lintas

Percepat Hasil Tes Swab

MUKOMUKO - Pengumuman kasus baru positif Covid-19 kemarin mendapat sorotan. Pasalnya, hasil positif itu keluar, setelah warga tersebut tuntas menjalani isolasi mandiri 14 hari. Ada 40 kasus positif baru berdasarkan hasil uji swab yang menjadikan Mukomuko kini tercatat sudah 174 kasus positif Covid-19.

Dari 40 orang warga yang mempunyai sampel swab itu, sebagian besar sudah dinyatakan sehat. Karena sudah isolasi mandiri sejak usai pengambilan sampel swab. Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM membenarkan, pada Rabu (16/12) malam, pihaknya menerima sejumlah hasil swab warga Mukomuko. Hanya saja, hasil swab yang keluar hari Rabu itu, sampel yang diambil pada akhir November dan awal Desember lalu.

Ada rentang waktu lebih dari 14 hari dari waktu pengambilan sampel swab dengan waktu keluarnya hasil laboratorium. Itu artinya, lanjut Bustam, 40 warga yang dinyatakan positif ini telah melalui masa inkubasi dan Covid-19 di dalam tubuhnya telah mati.

"Mereka sudah sembuh, karena sudah lewat 14 hari masa inkubasi. Teorinya kan begitu. Virus mati dengan sendirinya di masa inkubasi itu. Apalagi 40 orang ini memang tidak ada gejala. Jadi mereka tidak perlu lagi isolasi mandiri," terang Bustam.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berencana akan melakukan tracing atau penelusuran kontak erat. Untuk mengetahui siapa saja yang kontak erat dengan 40 warga yang dinyatakan positif ini. "Tracingnya bukan pada kontak erat setelah hasil swab ini keluar. Tapi kontak erat waktu kira-kira virusnya masih hidup. Perkiraan itu 2 hari sebelum pengambilan sampel swab sampai masa inkubasi berakhir," kata Bustam.

Lamanya hasil swab keluar, mendapat sorotan dari sejumlah masyarakat. Sebagian pun menyampaikan saran, dan mempertanyakan melalui akun media sosial masing-masing. Diantaranya ada yang meminta agar Pemkab Mukomuko segera menggendong rumah sakit atau fasilitas laboratorium khusus. Agar bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat untuk tes sampel swab. Atau jika memungkinkan, pengetesan sampel swab itu dapat dilakukan di Kabupaten Mukomuko. Dengan begitu, hasil swab tidak lama menunggu hasil. (hue)

Kapal dan Pukat Trawl Diamankan



DIAMANKAN: Satu set pukat trawl diamankan tim gabungan dalam Operasi Illegal Fishing.

MUKOMUKO - Tindakan tegas akhirnya ditunjukkan Tim Gabungan Operasi Illegal Fishing Kabupaten Mukomuko, kemarin (17/12). Satu unit kapal yang kedapatan tengah beroperasi menangkap ikan menggunakan pukat trawl ditangkap. Satu set pukat trawl ikut diamankan.

Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Mukomuko, Nasyardi, S.Pi mengatakan ketegasan tim gabungan tersebut sebagai peringatan bagi nelayan lain yang masih menggunakan pukat trawl. Bahwa imbauan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini harus dipatuhi. Surat pernyataan yang telah dibuat bagi nelayan yang kedapatan, bukan sekedar formalitas. Bahwa surat itu

benar-benar harus dipatuhi, dan ada konsekuensi jika tidak diindahkan.

"Satu kapal dan alat tangkapnya dengan berat hati kita amankan ke daratan," ujar Nas.

Kapal tersebut sesuai keterangan dari anak buah kapal (ABK), milik warga berinisial Da, warga Labuhan Tanjung Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kapal ini kedapatan menggunakan pukat trawl saat melaut di wilayah kawasan perairan Pantai Pondok Lima. Kapal ini ditindak setelah beroperasi menggunakan pukat trawl di perairan berjarak kurang satu mil dari bibir pantai.

"Kapal ini berasal dari Air

Haji. Terpaksa diamankan dan ditindak oleh tim gabungan," terangnya.

Tim gabungan hanya mengamankan satu set pukat trawl. Sedangkan kapal dan ABK, setelah diberi peringatan dibolehkan melanjutkan aktivitas menangkap ikan tanpa menggunakan pukat trawl. "ABK diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan penangkapan ikan dengan pukat trawl. Pukat trawlnya diamankan di Dinas Perikanan Mukomuko," jelas Nas.

Selain itu, tim gabungan juga mendata lima kapal lainnya yang juga kedapatan menggunakan pukat trawl. Kelima kapal tersebut diminta menyatakan tidak melakukan tindakan demikian di lain waktu. Tim gabungan tidak akan segan-segan menindak jika kembali kedapatan menggunakan alat tangkap yang sama saat melaut.

"Mereka menyatakan bersedia tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan data mereka ini kita pegang, dan selalu kita bawa ketika kembali menggelar operasi. Sehingga diketahui, jika ada yang mengulangi perbuatan serupa dan terjaring operasi," tegas Nas.

Tim gabungan yang menggelar Operasi Illegal Fishing terdiri dari Dinas Perikanan Mukomuko, Danposal Mukomuko, Polair Polres Mukomuko, dan Pokmaswas Muara Selagan. (hue)



PENYEMPROTAN: Kantor Dinas Dukcapil Mukomuko disemprot disinfektan oleh PMI Mukomuko. Aktivitas kantor ini tutup sementara setelah ada pegawainya positif Covid-19.

Pegawai Positif Covid-19, Dinas Dukcapil Ditutup

MUKOMUKO - Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mukomuko mendadak ditutup sementara, kemarin. Kebijakan ini diberlakukan hingga kantor ini akan dibuka kembali pada 21 Desember 2020. Hal ini setelah ada 40 warga Mukomuko positif Covid-19 yang salah satunya terdapat pegawai OPD tersebut.

Plt. Kadis Dukcapil Mukomuko, Evi Busmanja, M.Si mengatakan, pelayanan yang dihentikan untuk pelayanan tatap muka. Masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan memanfaatkan pelayanan secara online. Kebijakan ini, menurut Evi, sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan atas petunjuk dari Pemkab Mukomuko, dalam hal ini Sekda Mukomuko.

"Penutupan tersebut sudah seizin Kemendagri dan berdasarkan petunjuk Sekda Mukomuko. Penutupan pelayanan tatap muka ini cuma hari Kamis (17/12) dan Jumat (18/12). Kalau pelayanan secara online tetap kita buka," ujar Evi.

Dinyatakan Evi, bahwa satu orang pegawai Dinas Dukcapil Mukomuko yang positif terpapar Covid-19 tersebut, bukan karena tertular dari pegawai lainnya di dalam kantor dinas tersebut. Melainkan tertular dari keluarganya yang lebih dulu diketahui terpapar Covid-19. "Pegawai kita ini tertular dari keluarganya, bukan tertular saat berdinis di Dukcapil Mukomuko," tegas Evi.

Diterangnya, pada akhir November lalu, ada salah se-

orang keluarga dari pegawai Dinas Dukcapil itu dinyatakan positif terpapar Covid-19. Lalu yang bersangkutan turut dilakukan tes swab selaku salah seorang kontak erat. Pengambilan sampel swabnya diambil pada akhir November lalu.

Lalu, pegawai tersebut menjalani isolasi mandiri beberapa hari di rumahnya di Kecamatan V Koto. Sampai akhirnya pegawai ini mendapat surat keterangan sehat dari Puskesmas V Koto. Setelah melewati masa menjalani isolasi mandiri, baru heboh sekarang, karena hasil swab yang bersangkutan baru diterima Pemkab Mukomuko kemarin.

"Pegawai itu sempat masuk kerja sekitar empat hari. Ia berani kembali kerja karena telah mendapat surat keterangan kesehatan dari Puskesmas. Namun karena keluar hasil swab yang menyatakan dia positif, maka diputuskan pelayanan tatap muka di Dinas (Dukcapil) tutup sementara," terang Evi. Ia menambahkan penutupan kantor sebagai antisipasi.

Evi memastikan, Senin (21/12) masyarakat Kabupaten Mukomuko sudah bisa kembali mendapatkan pelayanan tatap muka. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan demi segera adanya pelayanan tatap muka, tidak menutup kemungkinan pihaknya mengerahkan fasilitas mobil pelayanan keliling.

"Kita berharap penutupan pelayanan tatap muka tidak terlalu lama terjadi. Sebab masih banyak masyarakat butuh pelayanan Dinas Dukcapil," ucap Evi. (hue)

JUAL & ISI ULANG
TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) GUARANTEED

CEGAH KEBAKARAN DI RUMAH ANDA???

GUNAKAN APAR

- Aman
- Praktis
- Ekonomis

Kami Siap Antan Ke Rumah Anda

-0813 6778 7901
-0812 6169 4484
-0823 76 77776
-0736 52881

Besaran DD 2021 Berubah

Disesuaikan Kinerja Desa

KEPAHIANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang memastikan pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021 tidak mengalami perubahan, sebesar Rp 86 miliar. Hanya saja pembagiannya untuk

setiap desa di Kabupaten Kepahiang tahun ini, besaran tidaklah sama. Banyak faktor yang mempengaruhi besaran DD yang akan diterima desa. Salah satunya disesuaikan dengan kinerja dan laporan masing-masing desa dalam realisasi DD tahun ini. "Dari penilaian itu, nantinya ada desa yang dapat penambahan

DD, dan ada juga yang mengalami pengurangan DD," ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, Ir. Ris Irianto kepada RB. Untuk DD tahun 2020 ini, Ris mengklaim, sebanyak 105 desa di Kabupaten Kepahiang sudah melakukan pencairan DD tahap III, dan realisasinya sudah disalurkan ke rekening masing-masing

desa. Tinggal lagi pihaknya menunggu laporan akhir dari masing-masing desa atas pencairan tahap III, paling lambat akhir tahun 2020. "Untuk evaluasi, terus kita lakukan dengan menggandeng inspektorat, BPK dan BPKP. Sementara ini dari hasil evaluasi untuk tahap I dan II, seluruh dasar-dasar kepatuhan terhadap

aturan penggunaan DD, 105 desa di Kabupaten Kepahiang masuk dalam kategori baik," jelas Ris. Terkait program prioritas di tahun 2021 dari DD, Ris mengatakan masih bertumpu pada tiga sektor. Yakni penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemulihan ekonomi melalui pembangunan

padat karya tunai. "Sebenarnya banyak program prioritas yang bisa dialokasikan melalui DD. Namun kita saat ini masih konsen di tiga sektor itu saja. Dan untuk persentasenya tergantung desa, berdasarkan usulan dari dusun yang disahkan melalui Musdes, dan disusun dalam RKPDes," demikian Ris. (sly).



PEMBAHASAN: Anggota Pansus Raperda RP3KP DPRD Kabupaten Kepahiang sedang melakukan pembahasan raperda, kemarin (17/12).

Selangkah Lagi, RP3KP Disahkan

KEPAHIANG - Sesuai rencana sebelumnya, DPRD Kabupaten Kepahiang akan menyelesaikan pembahasan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040, bulan ini. Tampak telah rampungnya pembahasan raperda tersebut di tingkat Panitia Khusus (Pansus), kemarin (17/12). Hasilnya akan segera disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang.

Ketua Pansus, Hendri, A.Md mengatakan dalam rapat kerja yang digelar tersebut, pihaknya telah melakukan perbaikan dan menyelesaikan pembahasan raperda. Baik pada pasal-pasal, maupun analisis dan penyesuaiannya terhadap keterkaitan peraturan perundangan lainnya. "Tinggal lagi kita akan buat laporan hasil, yang akan segera disampaikan kepada pimpinan dalam rapat gabungan komisi dalam waktu dekat," terang Hendri.

Ditambahkannya dengan telah diselesaikannya pembahasan raperda dan pengesahan, nantinya diharapkan dapat memberikan keteraturan ruang, verifikasi kebutuhan rumah layak huni dan pemenuhan. Juga penguatan syarat dalam rangka memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan.

"Ini nantinya akan menjadi rule of the game kita dalam melakukan pembangunan rumah layak huni. Juga sebagai acuan bagi kita nantinya untuk bisa mendapatkan stimulan bantuan DAK dari pemerintah pusat, khususnya untuk program perumahan," jelas Hendri.

Senada juga disampaikan anggota Pansus, Candra. Dia mengatakan bahwa raperda yang setelah dibahas dan diselesaikan ini, dapat memberikan nilai positif. Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Utamanya dalam menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, teratur, terencana dan berkelanjutan.

"Raperda yang telah kita selesaikan pembahasannya ini harus dapat menjadi penguat dan dasar bagi pemerintah daerah dalam hal verifikasi bad lock atau kekurangan kebutuhan pasokan rumah bagi penduduk," ujarnya. (sly)



SEKOLAH: Aktivitas beberapa murid di salah satu sekolah di Kecamatan Ujan Mas sewaktu masih diberlakukan pembelajaran secara tatap muka.

Sekolah Kembali Dibuka Pada Awal Tahun 2021

Nining: Kalau Ada Izin Pemkab

KEPAHIANG - Jika tidak ada kendala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepahiang akan kembali membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Bertepatan

dengan awal semester ganjil tahun 2021 yang dimulai bulan Januari.

Hal ini disampaikan Kabid Dikdas Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang, Nining Faweli Pasju, S.Pt, MM. Dia mengatakan, rencana pembelajaran secara tatap muka di sekolah ini hasil koordinasi pihaknya ke

Kemendikbud beberapa waktu lalu.

Didapat kesimpulan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah bisa dilaksanakan di semua zona.

"Jadi tidak ada lagi pakai zona warna apapun. Semua zona sudah bisa melaksanakannya. Namun dengan syarat, harus ada persetujuan dari orang tua siswa, sekolah dan pemerintah daerah. Dan tak terpenting lagi, tetap mempedomani aturan terkait penerapan protokol kesehatan," jelas Nining. Untuk persetujuan, sambung Nining, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi

dari Pemkab Kepahiang Sementara kalau izin dari orang tua siswa, sebagian besar menginginkan kembali anaknya belajar di sekolah. "Walaupun memang masih ada beberapa orang tua yang khawatir, namun sebagian besar menyarankan untuk kembali belajar di sekolah. Karena menurut para orang tua, metode pembelajaran dari rumah secara daring, tidaklah efektif," demikian Nining. (sly)

Dua Tahun Tak Dapat DAK

Jajaki Dana Hibah

KEPAHIANG - Tahun ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Tampaknya akan terulang di tahun 2021 mendatang. Ini disebabkan Provinsi Bengkulu untuk tahun ini tidak mendapatkan lokasi prioritas (Lokpri) dalam penyaluran DAK dari Kementerian Pemuda dan Olahraga

maupun Kementerian Pariwisata. Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang, Tedy Adeba, ST mengatakan, dengan tidak lagi menerima DAK di tahun 2021, maka Disparpora memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021. Kendati demikian, Disparpora akan tetap berupaya menyampaikan usulan di APBN Tahun Anggaran 2021.

"Ya, untuk tahun depan sama seperti tahun ini. Kita tidak mendapatkan DAK fisik, karena memang Provinsi Bengkulu tidak masuk dalam lokpri dari pemerintah pusat untuk tahun depan,"

terang Tedy. Sambung Tedy, untuk usulan dana dari APBN, Disparpora Kabupaten Kepahiang diperkirakan akan mendapatkan bantuan. Walau tidak semua usulan diakomodir oleh APBN, namun salah satu dari beberapa usulan tersebut bisa diakomodir. "Untuk APBN tahun depan, ada beberapa usulan yang kita sampaikan, dengan nominal yang berbeda-beda. Mulai dari Rp 2 miliar, Rp 5 miliar, hingga Rp 7 miliar. Berdasarkan informasi terbaru yang kita dapatkan, salah satunya berhasil kita dapatkan. Namun belum diketahui pasti usulan yang mana yang akan diakomodir," pungkasnya. (sly)

SH. TRUSS

RANGKA ATAP
BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGANTI KAYU

- > SH. TRUSS bebas perawatan
- > SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
- > SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZINC
- > SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kinibalau No.87 Kebun Tebeng Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870

KUPVA

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprato No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE
Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II
Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE
Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Miliki Segera Perumahan Subsidi : **Stock Terbatas!!**

BENTIRING PERMAI III
Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring

PEMATANG PERMAI
Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur

SURABAYA PERMAI V
Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebakul Kel. Surabaya

KPR Bisa Melalui **Bank BTN**

Hubungi: **PT. AHSANI KARYA**
Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu
Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405

STOK TERBATAS

KORPRI IDAMAN ESTATE
Rumah Type 36 Subsidi

Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING

Miliki Rumah Idaman Anda bersama Kami

PROMO BULAN INI **5 Juta** TERIMA KUNCI SKB

ANGSURAN MULAI **Rp. 877.741**

DIDUKUNG KPR **Bank BTN**

Segera Hubungi...!! ☎ 0852 6791 1112
☎ 0853 8431 2727 ☎ 0821 8265 4441

PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI
Kantor Pusat : Bakau No. 8 - 9 Jl. Tribrata - Kel. Cempaka Permai
Telp. (0736) 2339 - BENGKULU

PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER

VIMAX OIL & LINTAH OIL
(satu Menit Diolus Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)

- ~ **VIMAX OIL** : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanen untuk selamanya.
- ~ **PROKOMIL SPRAY** : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam.
- ~ **Sony Tablet**: Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syahwa/Impotensi, K. Manis, H. Encer, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membang serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti.....
- ~ **CREAM PAYUDARA** : Membesarkan, memadamkan, memotokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya.
- ~ **JUGA TERSEDIA** : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi Badan/Pembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, juga tersedia berbagai merk jamu import yang lain. Tersedia accessories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern.

HUBUNGI DISTRIBUTOR **Jl. Tonggiri No.20 Depan Pasar Ikan**
HU - SENG **Kampung Cina Kota Bengkulu**
HP. 0821 8270 7707

Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS KETAHANAN PANGAN Jalan Terminal Simpang Nangka Air Panas Atas CURUP - 3153					
Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup					
1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sardien	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

LINTAS

Pastikan Stok Darah Aman Hingga Akhir Tahun

CURUP - Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rejang Lebong (RL) selalu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan stok darah, khususnya untuk wilayah Kabupaten RL. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan pasien di RSUD Curup maupun membantu pasien warga Kabupaten RL yang berobat di rumah sakit lainnya.

Dijelaskan Mardiani, salah satu tenaga sukarela di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI kabupaten RL, kebutuhan darah yang mereka siapkan terutama bagi pasien yang menjalani operasi. Dimana hingga saat ini kebutuhan yang diperlukan masih bisa terpenuhi dengan stock darah yang mereka miliki di UTD PMI Kabupaten RL. "Mudah-mudahan stok kita aman untuk kebutuhan darah hingga akhir tahun ini," sampai Mardiani.

Dikatakan Mardiani, kebutuhan darah di Kabupaten RL sendiri setiap harinya bisa mencapai 40 kantong darah. Jumlah tersebut mayoritas untuk kebutuhan pasien cuci darah maupun keperluan operasi di RSUD Curup. Serta untuk kebutuhan perawatan 13 anak thalasemia yang dilakukan dua minggu sekali selama ini. (dtk)

PDAM Tirta Dharma Bebas Denda Tunggakan

Untuk Pelunasan 16-30 Desember 2020

CURUP - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong (RL) memanfaatkan momen akhir tahun 2020 untuk membantu pelanggan mereka. Salah satunya dengan meringankan beban pelanggan yang menunggak tagihan jika segera melunasi tagihan mereka ke PDAM Tirta Dharma.

Dijelaskan Direktur PDAM Tirta Dharma, Orin Retnowati kepada RB kemarin, jangka waktu pelunasan tunggakan rekening yaitu 16 sampai 30 Desember 2020 mendatang. Pelanggan PDAM Tirta Dharma khusus di wilayah Kabupaten RL akan dibebaskan dari denda tunggakan jika melunasi dalam kurun waktu tersebut.

"Benar, akhir tahun ini kita meluncurkan program pemberlakuan pembebasan denda bagi pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki tunggakan rekening air. Program sudah kita buka sejak 16 Desember lalu hingga 30 Desember mendatang dan berlaku bagi seluruh pelanggan di Kabupaten Rejang Lebong," sampai Orin.

Hal ini, sampai Orin, mereka meluncurkan guna membantu masyarakat agar bisa segera melunasi tunggakan rekening air mereka tanpa harus memikirkan jumlah denda yang akan dikenakan. "Namun ini hanya berlaku hingga 30 Desember 2020 mendatang. Makanya kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan pelunasan tunggakan," demikian Orin. (dtk)

Tiga Kasus Dugaan Money Politic Dihentikan

CURUP - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong (RL) menyebutkan, tiga laporan kasus dugaan money politic yang mereka terima, sudah dihentikan. Hal ini lantaran dari hasil tindak lanjut, tiga laporan tersebut unsurnya belum memenuhi, baik itu saksi maupun barang bukti.

Diantaranya, dugaan money politic dua laporan di Kecamatan Selupu Rejang dan laporan dari Kecamatan Curup Utara. Saat ini Bawaslu Kabupaten RL masih memproses dua laporan dugaan money politic lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Curup Timur. "Beberapa laporan sudah kita hentikan prosesnya karena belum memenuhi unsur dan untuk yang Kota Padang serta Kampung Melayu masih dalam proses," sampai Ketua Bawaslu Kabupaten RL Dodi Hendra Supiarso, SE kemarin.

Selain laporan dugaan money politic saat menjelang pencoblosan, sambung Dodi, mereka juga memproses beberapa dugaan keterlibatan ASN dalam pilkada Kabupaten RL. Dimana dua diantaranya sudah ada yang selesai dan sudah ada yang disampaikan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). (dtk)

Positif Corona Genap 400

CURUP - Jumlah warga Kabupaten Rejang Lebong (RL) yang terkonfirmasi positif Covid-19 kembali meningkat. Bahkan jumlah tambahan kasus konfirmasi baru tersebut cukup signifikan sebanyak 21 kasus baru yang membuat jumlah keseluruhan genap menjadi 400 kasus. Ini disampaikan

Penanganan Covid-19 Kabupaten RL sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB kemarin. Dirincikan Syamsir, kasus baru tersebut masing-masing kasus 380 perempuan (75) asal Curup Timur, kasus 381 laki-laki (41) asal Kecamatan Curup Timur dan kasus 382

perempuan (76) asal Kecamatan Curup. Lalu kasus 383 perempuan (34) asal Kecamatan Curup Tengah, kasus 384 laki-laki (5) asal Kecamatan Curup dan kasus 385 laki-laki (23) asal Kecamatan Curup Timur.

Selanjutnya, sampai Syamsir, kasus 386 perempuan (44) asal Kecamatan Curup Timur, kasus 387 perempuan (36) asal Kecamatan Curup Timur dan kasus 388 laki-laki (45) asal Kecamatan Curup Timur. Kemudian kasus 389 laki-laki (40) asal Kecamatan Curup Timur, kasus 390 perempuan (67) asal Kecamatan Curup Timur dan kasus 391 laki-laki (70) asal Kecamatan Curup Timur.

Lebih lanjut, ungkap Syamsir, kasus

392 laki-laki (45) asal Kecamatan Curup Tengah, kasus 393 laki-laki (23) asal Kecamatan Curup Timur dan kasus 394 laki-laki (35) asal Kecamatan Selupu Rejang. Serta kasus 395 perempuan (25) asal Kecamatan Selupu Rejang, kasus 396 laki-laki (20) asal Kecamatan Kecamatan Selupu Rejang, kasus 397 perempuan (26) asal Kecamatan Selupu Rejang, kasus 398 laki-laki (41) asal Kecamatan Curup Timur, kasus 399 laki-laki (42) asal Kecamatan Curup dan kasus 400 laki-laki (35) asal Kecamatan Curup Tengah.

"Jumlah warga terkonfirmasi positif baru ini tersebar di sejumlah kecamatan dan terbanyak di wilayah Kecamatan Curup Timur serta Ke-

camatan Seluu Rejang. Jumlah total kasus baru tersebut mencapai 21 kasus, namun sebagian sudah dinyatakan selesai konfirmasi," sampai Syamsir kemarin.

Dilanjutkan Syamsir, selain kasus positif baru, juga ada lima tambahan selesai konfirmasi atau sembuh. Masing-masing kasus 316, 317 dan kasus 32a0 asal Kecamatan Curup Tengah. Serta dua kasus lainnya, yaitu kasus 318 dan kasus 319 asal Kecamatan Curup. "Total keseluruhan dari 400 kasus positif, sudah 357 kasus diantaranya yang selesai konfirmasi atau sembuh. Sedangkan sisanya yaitu 43 kasus lagi masih dalam pengawasan," pungkas Syamsir. (dtk)



TUNTAS: KPU kabupaten RL sudah menuntaskan kegiatan rekapitulasi pilgub tingkat provinsi kemarin.

Angka Rekap Pilgub Tidak Berubah

KPU RL Tuntaskan Rekapitulasi Pilgub Tingkat Provinsi

CURUP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL), kemarin mengikuti kegiatan rapat pleno tekapitulasi tingkat provinsi bersama KPU kabupaten/kota lainnya. Khususnya untuk hasil rekapitulasi perolehan suara pilgub di Kabupaten RL, angka rekap tidak berubah alias sama dengan hasil rekap di pleno kabupaten.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kabupaten RL Visco Putra Alexander, S.IP, M.Si kemarin kepada RB. "Alhamdulillah kita sudah tuntas melaksanakan kegiatan rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi untuk pilgub. Seluruh angka hasilnya tidak berubah atau sama dengan hasil rekap kita saat pleno kabupaten dan sudah selesai kita laksanakan untuk tingkat

provinsi," sampai Alex.

Sehingga, sambung Alex, KPU Kabupaten RL tinggal lagi melaksanakan jadwal rapat pleno penetapan pasangan calon (paslon) terpilih untuk pilgub nantinya dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terkait sengketa pilkada serentak 2020. Jika memang tidak ada gugatan di Pilkada Kabupaten RL, maka paling lambat tiga hari setelah MK mengeluarkan BRPK, mereka harus menggelar rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

"Alhamdulillah seluruh rangkaian dan tahapan pilkada sudah selesai kita laksanakan, baik untuk pilgub maupun pilgub. Tinggal lagi kita menunggu MK mengeluarkan BRPK terkait sengketa pilkada serentak 2020. Kalau tidak ada gugatan sengketa pilkada di Kabupaten Rejang Lebong, maka paling lambat tiga hari setelahnya kita menggelar rapat pleno penetapan paslon terpilih," demikian Alex. (dtk)

Lampaui Target Nasional

Kendala Pandemi dan Cuaca Saat Coblos

CURUP - Target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) untuk jumlah persentase partisipasi masyarakat (Parmas) dalam menggunakan hak pilih mereka mencapai 80 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sesuai prediksi, dari hasil rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada bupati/wakil bupati, target tersebut memang tidak tercapai.

Dijelaskan Komisioner KPU Kabupaten RL Ujang Maman, S.Sos kemarin, data yang mereka himpun, persentase parmas dalam menyalurkan hak suara mereka untuk pilgub hanya mencapai angka 77,75 persen. Lalu untuk pilgub sendiri, parmas di Kabupaten RL tidak jauh berbeda yaitu hanya 77,98 persen. "Hitungan kita dari hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pilgub maupun pilgub, parmas untuk

pilgub mencapai 77,75 persen dan untuk pilgub mencapai 77,98 persen. Jumlah ini memang tidak mencapai atau tidak sesuai target awal kita yaitu minimal 80 persen dari jumlah DPT atau pemilih," sampai Ujang.

Hanya saja persentase parmas yang sudah dicapai, sambung Ujang, setidaknya sudah melampaui target nasional yaitu 77 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi angka parmas pada Pilkada Kabupaten RL, baik itu untuk pilgub maupun pilgub. Meskipun upaya sudah mereka lakukan maksimal dalam mensosialisasikan penggunaan hak pilih kepada masyarakat.

"Setidaknya upaya kita sudah melampaui target secara nasional yaitu diatas 77 persen. Usaha kita sudah maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi penggunaan hak pilih. Namun faktor kondisi sedang dalam pandemi Covid-19 serta cuaca hujan saat hari pencoblosan menjadi salah satu pengaruh masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka untuk datang ke TPS," demikian Ujang. (dtk)

RL Diguncang Gempa, Warga Diminta Waspada

CURUP - Sejak Rabu (16/12) malam hingga kemarin (17/12) siang, sudah lebih dari lima kali terjadi gempa bumi yang pusatnya berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong (RL). Hal ini cukup membuat masyarakat Kabupaten RL merasa cemas, namun tidak sampai melakukan upaya mengungsi. Karena memang belum ada laporan korban jiwa maupun korban materi dari kejadian gempa bumi tersebut.

Namun begitu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten RL M. Budianto, MT mengungkapkan, mereka meminta masyarakat tetap waspada dan jangan panik. Serta jangan mudah

termakan isu apapun terkait gempa bumi yang terjadi sejak Rabu malam tersebut. "Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada," imbau Budi.

Dilanjutkan Budi, sesuai informasi resmi dari BMKG gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi tektonik dan merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar lokal wilayah Kabupaten RL. Dimana dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Kabupaten RL dengan Skala Intensitas III - IV MMI. (dtk)

Polisi Identifikasi Pelaku Perampokan

CURUP - Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polres Rejang Lebong (RL) Polda Bengkulu masih melakukan upaya untuk mengidentifikasi para pelaku perampokan. Dimana perampokan terjadi pada malam sebelum hari pencoblosan atau Selasa (8/12) malam lalu di lokasi Indomaret Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah.

Untuk diketahui, akibat perampokan tersebut, dua unit handphone milik karyawan Indomaret berhasil dibawa kabur perampok. Termasuk uang tunai dari

berangkas Indomaret sebesar leih kurang Rp 36 juta juga berhasil dibawa kabur para perampok yang diduga menggunakan senjata api (Senpi) saat beraksi.

Diungkapkan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH Ahmad Kasat Reskrim AKP Helmad Musrin Muzni, SH, S.IK kepada RB kemarin, mereka sudah memeriksa saksi-saksi dilokasi kejadian, termasuk karyawan Indomaret yang menjadi korban perampokan. Selain itu, mereka juga melakukan pemeriksaan CCTV yang terpasang di Indomaret tersebut. (dtk)

Ulang Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.

<p>KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882</p>	<p>CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516 MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407</p>
---	--

• JUAL TANAH • LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 08522800488	• KEHILANGAN • SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.0001/TJAgung, NIB0706111200002, A/n Drs.BuyungJundari, Almt.Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talu Kab. Seluma	• KEHILANGAN • BPKB, Mobil Mitsubishi Miven GLX BD 1027 WY Noka MHMUD1W1V6J000447, Noin 4G15TB31565 A/N Pemerintah Kab Kaur	• KEHILANGAN • BPKB, Mobil Suzuki Pick Up Thn 2011 BD 9195 Y Noka MHYGDN41TBJ309415, Noin G15AID242250 A/N Syahrul	• KEHILANGAN • BPKB, Mobil Suzuki Jeep Thn 1994 BD 1978 LJ Noka MHDES16R005068, Noin G1GAI115004 A/N Agusman Ardin	• KEHILANGAN • BPKB, Mobil Datsun GO+ Thn 2015 BD 1068 CD Noka MHB1JCH2FFJ, Noin HR12737562T A/N Baharuddin	• KEHILANGAN • BPKB, No. 107523032, Noka. MHI-JF8114C473153, BD3781YA, Noin JF81E-1470476, A/n Anwar Fauzi
--	--	---	--	--	---	--

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira PengHubung :	081278617339
RSUD Benteng :	081368965552
Pos A Nakau :	085279125960
Pos B Meringgi Sakti :	085279125930

Keputusan Pengelolaan Eks HGU PT BRI

BENTENG - Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ATR BPN, akhir bulan ini akan mengambil keputusan terkait usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) untuk memanfaatkan lahan eks Hak Guna Usaha PT Bumi Raflesia Indah (BRI). Lahan yang diusulkan untuk dimanfaatkan tersebut seluas 398 hektare. Digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Benteng.

Hal ini diungkapkan langsung oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Benteng, Edy Hermansyah, S.Sos, M.Sc, Ph.D. Ia mengatakan, untuk saat ini semua master plan pemanfaatan lahan tersebut sudah diserahkan Pemkab Benteng ke Kementerian ATR BPN. Saat ini Menteri ATR BPN sudah menyampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan Pemkab Benteng bahwa dalam waktu dua minggu ini, pihak Kementerian akan memutuskan terkait pengajuan tersebut.

"Sejak Senin lalu (14/12), pihak Kementerian ATR BPN akan mempelajari terlebih dahulu terkait pengajuan kita dan master plan yang sudah kita berikan kepada mereka. Sehingga terhitung sejak Senin lalu, hingga dua minggu kedepan, mereka akan mempelajari dan kemudian akan memutuskan terkait pengajuan kita tersebut. Kemungkinan akhir bulan ini keputusan tersebut sudah kita terima," ungkapnya.

Dia menambahkan, semua keputusan dan kewenangan ada di Kementerian ATR BPN apakah pengajuan Pemkab bakal disetujui atau tidak. Pemkab Benteng berharap pengajuan mereka bisa disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Sebab Pemkab sudah merencanakan beberapa pembangunan yang akan mendukung perkembangan dan kemajuan yang ada di Benteng.

"Kita sangat berharap sekali disetujui perihal pemanfaatan lahan tersebut, sebab kita sudah merencanakan pembangunan Bengkulu Internasional Sport Center yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), kemudian pembangunan kampus dua Universitas Bengkulu, kemudian yang ketiga ada juga direncanakan pembangunan gedung pusat rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)," jelasnya.

Lanjutnya, untuk pembangunan pusat gedung rehabilitasi ini sama seperti yang ada di Bogor. Jadi di lahan eks HGU ini akan dibangun pusat rehabilitasi wilayah Sumatera, khusus wilayah pantai barat, sehingga gedung rehabilitasi ini nantinya bukan hanya untuk Bengkulu. Sehingga warga yang menjadi pecandu narkoba akan direhabilitasi di tempat yang sudah direncanakan dibangun tersebut.

"Terakhir kita juga akan merencanakan pembangunan untuk kepentingan Pemkab Benteng seperti membangun beberapa sarpras gedung yang saat ini masih belum ada. Kemudian kita juga akan melakukan pembangunan pusat perekonomian kreatif, pariwisata berbasis ekonomi kreatif di lokasi tersebut. Semoga rencana yang sudah kita buat ini bisa terealisasi dengan disetujuinya pengajuan kita kepada Pemerintah pusat tersebut," tutup Edy. (jee)

Terbitkan SE Larangan Berkumpul

BENTENG - Satpol PP Bengkulu Tengah (Benteng), kemarin menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Benteng nomor 12/73/B.1.Satpol PP, tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan. Tetapi, pesta pernikahan tetap diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R, SE, MM mengatakan, enam poin yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Pertama tidak menyediakan tempat berkumpul, pertemuan, hiburan dan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Kedua, tidak mengadakan kegiatan perayaan menyambut tahun baru 2021.

"Kemudian ketiga tidak menyelenggarakan pasar malam atau konser musik. Keempat rumah ibadah, tempat hiburan, restoran, cafe dan lainnya, tetap dan wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Kelima khusus restoran dan cafe buka maksimal pukul 21.00 WIB. Keenam bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi terpapar Covid-19 diminta menjauhi kerumunan dan lebih baik berdiam diri di rumah," jelasnya.

Dia menambahkan, dengan sudah dikeluarkannya SE ini, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian, TNI dan pemerintah kecamatan untuk mengawasi jelang pergantian tahun. Untuk memastikan tidak ada masyarakat yang menggelar perayaan menyambut tahun baru (nataru) dengan mengadakan acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. (jee)



PINJAMAN: Salah satu warga yang sedang bertransaksi keuangan di Bank Bengkulu.

UMK Benteng 2021 Rp 2,3 Juta

Naik Rp 9 Ribu

BENTENG - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu nomor E.376.DK-KTRANS tahun 2020, besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkulu Tengah (Benteng) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2,3 juta. Naik Rp 9.000 dari UMK tahun ini yang hanya Rp 2,291 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Benteng, H. Masdar Helmi, SE membenarkan, perihal SK yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu mengenai UMK Benteng tahun 2021 mendatang. Dari SK yang dikeluarkan oleh Gubernur tersebut, memang UMK Benteng mengalami kenaikan menjadi Rp 2,3 juta.

"Dari total tersebut UMK Benteng mengalami kenaikan sebesar Rp 9 ribu, sebab pada tahun sebelumnya UMK Benteng di angka, Rp 2.291.000. dengan sudah diterbitkannya SK yang ditetapkan, maka selanjutnya akan disosialisasikan ke seluruh perusahaan

yang ada di Benteng. Bahkan pihaknya meminta agar buruh dapat melaporkan jika terjadi kendala dalam perusahaan," jelasnya.

Dia menambahkan, jika kesejahteraan para buruh dipikirkan tanpa mengesampingkan komponen pertimbangan lainnya. UMK yang ditetapkan saat ini sudah harus ditaati oleh seluruh perusahaan yang ada di Benteng, semua ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.

"Dengan sudah diterbitkannya keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: N.503. NAKERTRAN Tahun 2019 tanggal 21 November tahun 2019, tentang UMK Kabupaten Benteng tahun 2020 dicabut dan sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian untuk kenaikan UMK pada tahun 2021 ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2021 mendatang," demikian Masdar.

Di tempat berbeda, Ketua FSPPP PSPI Benteng, Haulan Ismadi mengungkapkan, kalau ia cukup menyayangkan

angka penetapan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan yakni Rp 2,45 juta, karena kenaikan UMK ini terbilang sangat kecil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi meskipun begitu, pihaknya tidak ingin adanya kerucuhan dan meminta seluruh buruh dapat menerima besaran yang ada.

"Kalau merasa puas tentu tidak, karena belum sesuai dengan usulan yang diharapkan. Tapi karena sudah di SK kan, kita mengimbau dan berharap kepada para perusahaan dan pelaku usaha yang ada di Benteng agar dapat menerapkan semua yang sudah ditetapkan oleh Gubernur ini perihal kenaikan UMK ini," ujarnya.

Haulan mengungkapkan, tahun depan, pihaknya akan kembali mengusulkan kenaikan besaran UMK sembari melihat angka inflasi dan kebutuhan hidup layak masyarakat. "Karena kita akan terus memperjuangkan kesejahteraan dari para buruh, terutama dalam menentukan besaran UMK," tutup Haulan. (jee)



PARKIR: Salah satu parkir yang retribusinya dipungut oleh Dishub Benteng.

PAD Parkir Baru Rp 28 Juta

BENTENG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengklaim jika saat ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang dipungut Rp 28 juta. Pencapaian tersebut masih kurang dari target sebesar Rp 38 juta. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Dishub Benteng, Sugeng Oswari. Dia menjelaskan, belum tercapainya PAD retribusi parkir hingga saat ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Benteng. Sebab pendapatan dari parkir ini menurun drastis jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

"Untuk target awal PAD parkir kita ini sebenarnya sebesar Rp 52 juta per tahun. Akan tetapi dikarenakan Covid-19, target PAD retribusi parkir dikurangi

hanya 38 juta pertahun. Namun tetap saja target tersebut tetap saja tidak bisa tercapai karena kondisi yang membuat semuanya seperti sekarang," jelasnya.

Dia menambahkan, tahun 2021 mendatang, pihaknya juga sudah kembali merargetkan PAD retribusi parkir ini naik kembali menjadi Rp 52 juta. Untuk mengimbangi target Dishub dalam mendapatkan PAD retribusi parkir sebesar Rp 54 juta tersebut, pihaknya akan menambah zona parkir yang ada di Kabupaten Benteng saat ini.

"Pada saat ini untuk titik parkir yang ada di Benteng sebanyak 16 titik. Dari 16 titik parkir tersebut kita akan menambahkan titik parkir sebanyak 16 titik lagi, sehingga nantinya untuk jumlah

titik parkir yang ada di Benteng sebanyak 32 titik. Ini harus dilakukan, sebab apabila hanya mengandalkan 16 titik parkir yang lama, target kita sebesar Rp 52 juta tersebut akan sulit tercapai," jelasnya.

Lanjutnya, dalam rencana penambahan titik parkir ini, Dishub sudah merencanakan penambahan di beberapa titik. Diantaranya seperti titik parkir yang ada di objek wisata di Kecamatan Taba Penanjung seperti objek Bukit Kandis.

"Kemudian beberapa titik di wisata Kecamatan Semidang Lagan, seperti air terjun di Desa Bukit dan beberapa titik lainnya. semoga dengan adanya penambahan titik parkir ini, kedepan kita bisa mencapai dan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan tersebut," tutup Sugeng. (jee)

Perangkat Desa Tak Bisa Ajukan Pinjaman

Jika Tak Miliki Ijazah SMA

BENTENG - Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Bengkulu Tengah (Benteng) tidak bisa memberikan pinjaman uang pada perangkat desa yang tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kabag Pemasaran dan Kredit, Cabang Karang Tinggi Benteng, Rika Rosita, SH mengatakan, kalau Bank Bengkulu mengacu terhadap Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut. Sebab di Permendagri tersebut diatur, kepala Desa minimal harus berpendidikan SMA untuk melengkapi semua administrasi dalam pengajuan peminjaman. Selain itu juga mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2020.

"Sehingga dengan adanya peraturan ini kita tidak bisa memverifikasi mereka untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Bengkulu. Sebab akan adanya kekhawatiran apabila nanti mereka tidak menjabat dan diberhentikan karena tidak memiliki ijazah SMA, sehingga tidak bisa lagi membayar iuran pinjaman yang seharusnya mereka bayarkan," jelasnya.

Dia menambahkan, apabila hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan Bank Bengkulu. Sebab mereka sudah tidak menjadi perangkat desa dan akan lari dari kewajibannya. Apabila memang mereka ingin mendapatkan pinjaman, mereka harus terlebih dahulu menuntaskan pendidikan mereka untuk mendapatkan ijazah SMA, apabila mereka sudah bisa melampirkan ijazah SMA, maka pinjaman bisa diberikan.

"Sebab dalam pengajuan pinjaman khusus perangkat desa, selain melampirkan SK perangkat desa, fotocopy slip gaji, mereka juga harus melampirkan ijazah SMA sederajat. Apabila tidak ada ijazah SMA, maka kita tidak bisa mencarikan atau menyetujui ajuan peminjaman dari mereka tersebut," jelasnya.

Lanjutnya, untuk diketahui hingga saat ini untuk perangkat desa yang sudah dicarikan pinjamannya sebanyak 249 perangkat desa. "Dari 249 perangkat desa yang sudah dicarikan total anggaran yang sudah kita keluarkan sebesar Rp 13,4 miliar. Namun jumlah pencairan pinjaman perangkat desa ini akan terus bertambah untuk kedepannya, karena hingga saat ini sudah banyak perangkat desa yang memasuki berkas kepada kita untuk mengajukan pinjaman," demikian rika. (jee)

160 Pemilih Disabilitas Salurkan Hak Suara

BENTENG - Pada saat penyaluran hak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 9 Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mendata, jika antusias pemilih kategori disabilitas sangat tinggi. Dari 187 pemilih, 160 pemilih menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU Benteng, Drs. Brotoseno mengatakan, dari 187 daftar pemilih disabilitas yang ada di Benteng, diketahui hanya 27 orang yang tidak menyalurkan hak suaranya atau memilih golput pada Pilgub beberapa hari yang lalu. Dikarenakan 160 orang pemilih disabilitas ikut berpartisipasi dalam menyalurkan hak suaranya atau tidak golput.

"Apabila dipersentasikan, 85 persen pemilih disabilitas kita sudah ikut dalam menyalurkan hak suaranya. Dengan begini membuktikan jika partisipasi pemilih disabilitas saat ini sangat tinggi. Meskipun pada hari H pencoblosan terjadi hujan, namun mereka tetap ingin menyalurkan hal suaranya," jelasnya.

Dia menambahkan, dari 11 Kecamatan un-

tuk rincian pemilih disabilitas yang menyalurkan hak suaranya terdiri dari Kecamatan Karang Tinggi ada 18 pemilih disabilitas, Talang Empat ada 2 pemilih disabilitas, Pematang Tiga ada 48 pemilih disabilitas, Pagar Jati ada 19 pemilih disabilitas, Taba Penanjung 10 pemilih disabilitas.

"Kemudian, Merigi Kelindang ada 14 pemilih disabilitas, Merigi Sakti ada 6 pemilih disabilitas, Pondok Kubang ada 18 pemilih disabilitas, Bang Haji ada 13 pemilih disabilitas, Semidang Lagan ada 12 pemilih disabilitas. Dari 11 Kecamatan tersebut hanya di Pondok Kelapa yang tidak ada pemilih disabilitasnya," ujarnya.

Untuk diketahui, Kecamatan yang pemilih disabilitasnya menyalurkan suaranya 100 persen berada di Kecamatan Pematang Tiga dan Merigi Sakti. "Karena di Pematang Tiga ada 48 pemilih disabilitas yang terdaftar dan semuanya menyalurkan (hak pilihnya, red). Kemudian di Kecamatan Merigi Sakti ada 6 pemilih disabilitas yang terdaftar dan semuanya menyalurkan hak suaranya," pungkaskanya. (jee)

PROMO PALING MURAH DISKON PALING BESAR Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4Jt
Innova Angsuran 5,6Jt
Fortuner Angsuran 8,5Jt

Promo Paling Murah | Discon Paling Besar | Buruan Hanya dibulan ini!

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertabur Hadiah

Minat..??? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS

DI JUAL RUKO 2 LANTAI

LOKASIS STRATEGIS
Lokasi: Jl. M.T. Haryono Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Sentiong, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego
Minat Hub. April 0813 7347 7299

JUAL RUKO
Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Kompi Bengkulu (pas didepan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RM padang dan sebelah kanan warung Bakso

fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon. cocok untuk usaha apa saja.
Harga 360 Juta nego
Minat hubungi : 082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas :
3 Km² Tidur, 1 R. Tarnu, 1 R. Tv/Keluarga, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagur Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi : 0878 9496 1917 0819 1931 8688 (Berminat silahkan cek lokasi)



Tak Ada Laporan Pelanggaran Prokes Covid

Selama Pelaksanaan Pilkada 2020

BENGKULU - Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah menyebut jika selama pelaksanaan proses Pilkada serentak di Bengkulu tak ada laporan adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Ini disampaikan Darlinsyah kepada wartawan ditemui usai rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada tingkat Provinsi bertempat di Hotel Mercure, Kamis (17/12).

Dijelaskannya, dalam pelaksanaan Pilkada ditengah kondisi pandemi covid-19 yang luar biasa ini, setiap tahapan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penerapan protokol kesehatan (prokes).

"Dengan kondisi yang luar biasa ini, kita juga tidak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan. Karena prokes tetap kita junjung tinggi dan di lapangan juga tetap bersinergi," ungkap Darlinsyah.

Sementara itu, Darlinsyah juga mengatakan bahwa

Provinsi Bengkulu menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang menggelar rekapitulasi suara Pilkada. Sesuai jadwal tanggal yakni pada 16-20 Desember 2020. "Berarti hari ini termasuk hari kedua. Namun hari ini kita yang pertama menggelar Pleno se-Indonesia, sedangkan Provinsi lain itu rata-rata besok yakni pada tanggal 18 Desember 2020," terang Darlinsyah.

Disebutkannya, jika sebenarnya berkaitan dengan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Bengkulu ini, sudah di clear-kan oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota. Dimana dalam pelaksanaan ini, sudah hak pilih sudah terlindungi dan tidak ada halangan untuk mendapatkan hak pilihnya.

"Selama 3 hari setelah hasil pleno ditetapkan, maka Paslon berhak untuk menyampaikan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika tidak ada maka tentu akan clear. Mudah-mudahan Pleno yang diadagkan sampai dengan tanggal 20 ini berjalan dengan baik dan tidak ada masalah," pungkasnya. (zie)

Bijak Pilih Kegiatan Saat Libur Panjang

BENGKULU - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Satpol PP Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat bijak memilih kegiatan yang mengisi libur panjang di akhir tahun ini.

Kasat Pol PP Provinsi Bengkulu Muarlin mengatakan, akan ada kemungkinan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang. Selain ada libur panjang di akhir tahun 2020 apalagi baru ini kota dan kabupaten telah mengeluarkan surat edaran larangan berkerumunan. Kami memahami masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan rutinitas yang hampir seluruhnya dihabiskan di dalam rumah. "Akan tetapi perlu saya

ingatkan musuh kita belum hilang sepenuhnya, pandemi belum selesai," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Muarlin, masyarakat perlu memiliki pertimbangan dalam memilih kegiatan di masa liburan panjang dengan kebijaksanaan yang dibangun dari masing-masing individu untuk sebisa mungkin meminimalisasi kontak dan kerumunan.

"Selalu sadar perhatikan protokol kesehatan, apalagi kondisi rumah sakit sudah over kapasitas. Satgas berusaha mendorong pemda untuk terus melakukan pengawasan kondisi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menganalisis situasi yang lebih rinci," ungkap (hkm)

Dana Desa Prioritaskan Penanganan Covid-19

BENGKULU - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.I.P, MM menyampaikan jika pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesP-DTT).

Ada banyak yang disampaikan wakil rakyat Provinsi Bengkulu tersebut ke pihak kementerian, salah satunya berkaitan dengan penanganan wabah covid-19 di desa-desa. "Banyak hal yang kita sampaikan ke Kementerian terkait dana desa. Dari penjelasan pihak kementerian, dana desa itu tahun depan dialokasikan tetap, hanya saja prioritas penggunaan anggarannya untuk penanganan Covid-19," jelas Edwar Samsi kepada

wartawan, Kamis (17/12).

Dijelaskan Edwar, harapan pemerintah pusat bahwa penanganan Covid-19 yang masih menjadi pandemi

saat ini dilakukan secara serentak dan lebih luas di seluruh penjuru Indonesia. Termasuk juga di desa-desa sehingga penyebaran ini dapat dihentikan. "Karena sasarannya mencegah penyebaran Covid-19 ini lebih luas," ungkapnya.

Edwar menuturkan, awalnya program Presiden Joko Widodo mengenai dana desa ini adalah pembangunan Indonesia dimulai dari desa. Namun karena terjadinya pandemi covid-19, maka mau tidak mau penanganannya harus dilakukan. (zie)



ARAHAN: Dansat Brimobda Bengkulu meminta anggotanya selalu siap siaga mengantisipasi apabila terjadi situasi kontijensi.

Personel Brimob Diminta Berikan Imbauan Prokes Juga Harus Jaga Diri

BENGKULU - Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Bengkulu Kombes Pol. Susnadi, S.IK mengingatkan personilnya untuk menjaga diri dan juga mengingatkan kepada masyarakat pentingnya penerapan protokol

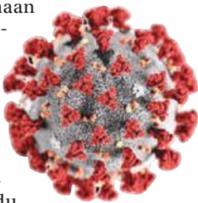
kesehatan (prokes) dimasa pandemi covid-19 yang masih menjadi pandemi saat ini. Pesan tersebut disampaikan Susnadi saat memimpin apel kesatuan bertempat di Makosat Brimob Polda Bengkulu. Dikatakan, apel kesatuan bertujuan mengecek kesiapan personel Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam rangka mengantisipasi situasi kontijensi dimana personel harus selalu siap apabila di tugaskan kapanpun dan dimanapun. "Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam mengantisipasi situasi kontijensi akan terus melaksanakan kesiapan kapanpun untuk digerakan. Selalu tingkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas serta selalu siap kapanpun, dimanapun apabila dibutuhkan,"

pesannya. Menyikapi situasi pandemi covid-19 yang setiap hari jumlah kasusnya mengalami peningkatan dia berharap agar seluruh personilnya dapat menjaga diri dengan baik serta menerapkan prokes agar dapat terhindar dari penyebaran wabah ini. Dia juga meminta agar personilnya mengingatkan masyarakat agar senantiasa menerapkan prokes covid-19 baik memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. "Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita berdoa Kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa agar wabah Covid-19 segera berakhir," ungkapnya. (zie)

LINTAS

Pelayanan Posbindu PTM Masih Belum Maksimal

BENGKULU - Pos Binaan (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.



Kasi PTM Dinkes Provinsi Bengkulu Andi Aprianto mengatakan, selama masa pandemic covid-19 Kelompok PTM masih terhambat untuk melakukan cek up. Penyakit tidak menular utama biasanya meliputi diabetes melitus (DM), kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJP). Serta penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

"Di Provinsi Bengkulu sendiri sekitar 60 persen kasus kematian akibat Covid-19 adalah orang-orang dengan penyakit komorbid dan lanjut usia. Kami juga belum bisa maksimal mengaktifkan kembali program Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang ada di Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu cara penanganan Covid-19 khususnya menekan angka kematian akibat, akan melakukan pendataan pada kelompok usia renta dan warga yang memiliki penyakit bawaan. Beberapa penyakit kronis yang kerap ditemui dalam kasus kematian pasien positif Covid-19, lanjut dia, yakni hipertensi, diabetes, ginjal, jantung dan lain sebagainya. "Oleh karena itu, kami mengimbau untuk mewaspadai penularan terhadap kelompok rentan yang terdiri dari lansia dan penderita penyakit bawaan," jelas Andi.

Menurut dia, untuk menekan resiko pada kelompok rentan, Dinkes akan akan melakukan pendataan dengan melibatkan aparat kecamatan dan desa serta petugas puskesmas.

"Kepala desa dan camat akan mencatat siapa saja warga yang usianya di atas 50 tahun serta yang punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, kanker dan gagal ginjal. Dari data itu, nanti puskesmas yang akan melakukan pengobatan kepada mereka," paparnya.

Dia berharap Posbindu-PTM kembali diaktifkan dengan sejumlah modifikasi. Sebelumnya, Posbindu-PTM hanya untuk pemantauan kesehatan, namun kali ini juga diarahkan untuk penanganan penyakit. (hkm)

Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN

di Era Adaptasi Baru

BENGKULU - Pemprov Bengkulu diwakili Asisten III Setdaprov Gotri Suyanto mengikuti Rakornas Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Baru secara virtual, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (17/12).

Dikatakan Gotri Suyanto, digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam era kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 memang sangat perlu. Menurut Gotri, dengan digitalisasi maka dapat mempermudah akses kebutuhan khususnya para ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Sehingga seluruh urusan yang berhubungan dengan kepegawaian dapat dilakukan dengan sistem elektronik," kata Gotri usai mengikuti rakornas penerapan digitalisasi manajemen ASN di era adaptasi baru secara virtual, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (17/12).

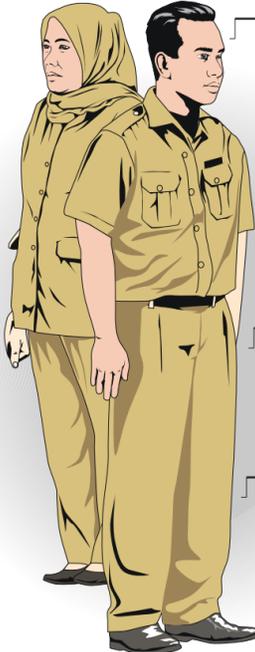
Di Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, khususnya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah dilakukan sistem elektronik guna mempermudah proses administrasi kepegawaian. Hanya lagi, pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan SDM untuk menjalankan aplikasi yang diminta oleh pemerintah pusat.

Gotri berharap dengan digitalisasi manajemen ASN ini dapat lebih meningkatkan kinerja para abdi negara di Provinsi Bengkulu, sehingga lebih efektif dan efisien. Di samping itu, jelasnya, dalam digitalisasi ASN ini maka perlu disiapkan kemampuan SDM di bidang teknologi dan informasi serta sarana dan prasarannya yang memadai.

"Selanjutnya, juga perlu adanya regulasinya, sehingga proses dalam administrasi kepegawaian nantinya dapat lebih lancar dan benar," tukasnya.

Rakornas yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan dihadiri Menteri PAN/RB, Kepala BKN

PERWUJUDAN PERCEPATAN REFORMASI DIGITALISASI



Percepatan penyelesaian regulasi serta pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik

Percepatan penyelesaian pembangunan dan pengembangan sarana infrastruktur digital.

Pemetaan dan penyederhanaan struktur bisnis kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN terutama dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital menuju transformasi digital dunia.

serta diikuti seluruh perwakilan Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Dalam amanatnya, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, digitalisasi manajemen ASN ini merupakan bagian dari visi dan misi nasional yaitu reformasi birokrasi.

Untuk terwujudnya percepatan reformasi digitalisasi pemerintah maka harus difokuskan pada berbagai hal, baik pada sisi regulasinya maupun sisi sarana dan prasarana pendukungnya. Pertama, percepatan penyelesaian regulasi serta pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Kedua, percepatan penyelesaian pembangunan dan pengembangan sarana infrastruktur digital.

"Selanjutnya, pemetaan dan penyederhanaan struktur bisnis kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta peningkatan kompetensi ASN terutama dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital menuju transformasi digital dunia," papar wapres. (key)